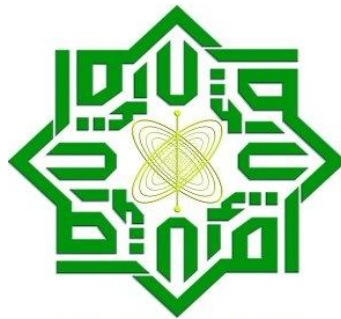


# **SKRIPSI**

## **PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN DI DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi  
Publik (S.Ap) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH**

**RONY JAYA**  
**NIM. 10975008248**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2013**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN DI DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN**

**Oleh : Rony Jaya**

*Kepala desa berperan dalam melakukan rentetan usaha bersama masyarakat dalam melakukan perbaikan secara sadar ke arah kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Hal ini didasari oleh adanya fenomena kondisi beberapa lembaga kemasyarakatan yang fasif, rendahnya partisipasi masyarakat, nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang mulai terkikis, perencanaan pembangunan yang kurang teralisasi dengan baik, serta beberapa indikasi kepala desa belum menjalankan peranannya sebagai administrator pembangunan dengan baik. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan kepala desa dalam menjalankan peranannya. Kepala desa sebagai administrator pembangunan menjalankan peranannya sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Khusus dalam penelitian ini amanat tersebut sesuai dengan Perda Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2010, yang mana kepala desa berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui pengaturan, menyelenggarakan urusan pembangunan melalui pemberdayaan, menyelenggarakan pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data, angket dan wawancara, populasinya adalah masyarakat berdasarkan jumlah KK yaitu 663 KK, dan menggunakan tehnik sampel acak (random sampling) serta penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin tingkat kesalahan 10% jadi jumlah sampel 87 responden yang mengisi angket, sedangkan untuk wawancara penulis menggunakan key informan yaitu Kepala desa, Sekdes, Ketua BBD, dan dua orang tokoh masyarakat. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan sudah berjalan dengan cukup baik karena di dasari oleh kepala desa cukup mampu memainkan peranannya, hanya saja kepala desa kurang merangkul dan memberdayakan lembaga kemasyarakatan di desa sebagai mitra kerja untuk melakukan perbaikan secara bersama-sama. Adapun faktor penghambat, terdiri atas faktor internal yaitu kepala desa kurang mendayagunakan fungsi pengawasan sebagai alat kontrol, dan belum menjalankan koordinasi dengan maksimal terhadap mitra kerja, sedangkan faktor eksternal kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, kualitas Sumber Daya Manusia aparat pemerintahan yang masih minim, serta pemerintah daerah kurang memfasilitasi pelaksanaan otonomi desa secara maksimal karena penganggaran ADD yang masih belum jelas dan belum berjalan.*

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**ABSTRAK**

<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	12

**BAB II TELAAH PUSTAKA**

2.1 Administrasi Pembangunan .....	14
2.2 Otonomi Daerah .....	20
2.3 Otonomi Desa .....	21
2.4 Pembangunan Desa .....	28
2.5 Peranan Kepala Desa .....	35
2.5.1 Pengertian Peranan .....	35
2.5.2 Tugas dan Fungsi Kepala Desa .....	36
2.5.3 Peranan Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan .....	43
2.6 Peran Kepemimpinan Dalam Pandangan Islam .....	45
2.7 Penelitian Pendahuluan.....	50
2.8 Defenisi Konsep .....	51
2.9 Konsep Oprasional .....	53

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	56
3.2 Sumber Data .....	56
3.3 Populasi dan Sampel .....	57
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	59

3.5	Analisa Data .....	59
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>		
4.1	Keadaan Geografis Desa Pongkar .....	61
4.2	Penduduk .....	62
4.3	Agama Penduduk.....	63
4.4	Pendidikan .....	65
4.5	Kesehatan .....	66
4.6	Mata Pencaharian .....	67
4.7	Pemerintahan .....	68
4.7.1	Profil Kepala Desa Pongkar .....	69
4.7.2	Tugas dan Fungsi Aparat Pemerintah Desa .....	70
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
5.1	Identitas Responden.....	76
5.1.1	Jenis Kelamin Responden .....	76
5.1.2	Umur Responden .....	77
5.1.3	Tingkat Pendidikan Responden .....	77
5.1.4	Mata Pencaharian Responden.....	79
5.2	Peranan Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.....	80
5.2.1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan .....	81
5.2.2	Menyelenggarakan Urusan Pembangunan.....	94
5.2.3	Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Desa.....	102
5.2.4	Menyelenggarakan Urusan Kesejahteraan Masyarakat	108
5.3	Analisa Data .....	120
<b>BAB VI PENUTUP</b>		
6.1	Kesimpulan.....	125
6.2	Saran .....	127

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa Pongkar Tahun 2012 .....	6
Tabel II.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	54
Tabel III.1	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian .....	58
Tabel IV.1	Penduduk Desa Pongkar Menurut Umur dan Jenis Kelamin .....	63
Tabel IV.2	Penduduk Desa Pongkar Berdasarkan Agama yang dianut	64
Tabel IV.3	Sarana Peribadatan di Desa Pongkar .....	64
Tabel IV.4	Penduduk Berdasarkan Etnis .....	65
Tabel IV.5	Sarana Pendidikan di Desa Pongkar .....	66
Tabel IV.6	Sarana Kesehatan Desa Pongkar .....	67
Tabel IV.7	Mata Pencaharian Penduduk di Desa Pongkar .....	67
Tabel IV.8	Sarana Pemerintahan Desa Pongkar .....	69
Tabel V.1	Jenis Kelamin Responden .....	76
Tabel V.2	Tingkat Umur Responden .....	77
Tabel V.3	Tingkat Pendidikan Responden .....	78
Tabel V.4	Jenis Mata Pencaharian Responden .....	79
Tabel V.5	Jawaban Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Menyusun Perencanaan .....	82
Tabel V.6	Jawaban Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengambil Keputusan .....	83
Tabel V.7	Jawaban Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Menggerakkan Bawahan Dalam Pelayanan .....	84
Tabel V.8	Jawaban Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa dalam Menggerakkan Lembaga Kemasyarakatan Desa .....	87
Tabel V.9	Jawaban Responden Mengenai Pengaturan desa yang dibuat bersama BPD .....	89
Tabel V.10	Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Peraturan/kebijakan Oleh Kepala Desa .....	90
Tabel V.11	Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Pengawasan kepala desa dalam setiap program/kegiatan .....	91
Tabel V.12	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Peranan Kepala desa dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	93

Tabel V.13	Jawaban Responden Mengenai Pemberdayaan Masyarakat dengan memfasilitasi masyarakat dalam perencanaan .....	94
Tabel V.14	Jawaban Responden Mengenai Pemberdayaan masyarakat oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan .....	95
Tabel V.15	Jawaban Responden Mengenai Pemberdayaan masyarakat oleh kepala desa dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan.....	97
Tabel V.16	Jawaban Responden Mengenai Pemanfaatan sarana dan prasarana umum desa .....	98
Tabel V.17	Jawaban Responden Mengenai upaya kepala desa dalam memelihara sarana dan prasarana umum desa.....	99
Tabel V.18	Rekapitulasi jawaban responden mengenai peranan kepala desa dalam penyelenggaraan urusan pembangunan .....	101
Tabel V.19	Jawaban Responden Mengenai Kesempatan Masyarakat untuk Ikut menentukan penggunaan Keuangan Desa .....	102
Tabel V.20	Jawaban Responden Mengenai Akses Masyarakat untuk Mengetahui Informasi Pengelolaan Keuangan Desa.....	104
Tabel V.21	Jawaban Responden Mengenai Keterangan Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.....	105
Tabel V.22	Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Pencatatan dan Pembukuan Keuangan Desa .....	106
Tabel V.23	Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Peranan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa	107
Tabel V.24	Jawaban Responden Mengenai Pembinaan Masyarakat Melalui Kegiatan Penyuluhan .....	109
Tabel V.25	Jawaban Responden Mengenai Upaya Pembinaan dengan Berpartisipasi dalam Kegiatan Masyarakat .....	110
Tabel V.26	Jawaban Responden Mengenai Upaya Pembinaan Masyarakat melalui kegiatan keagamaan .....	111
Tabel V.27	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Peranan Kepala Desa dalam Perekonomian Desa .....	112
Tabel V.28	Jawaban Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa dalam Mendamaikan Perselisihan Masyarakat .....	114
Tabel V.29	Jawaban Responden Mengenai Upaya Kepala Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.....	116
Tabel V.30	Jawaban Responden Mengenai Upaya Kepala Desa dalam Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat .....	117

Tabel V.31	Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Peranan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Urusan Kesejahteraan Masyarakat .....	119
Tabel V.32	Rekapitulasi Keseluruhan Hasil Penelitian tentang Peranan Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan di Desa Pongkar .....	120

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.....	71
--	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu usaha melalui pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat dalam melakukan pembangunan harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi serta mamfaat untuk kesejahtraan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang mengatur tentang pembagian pemerintahan di Indonesia yang kemudian pada masa orde baru dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

Setelah reformasi terjadi perubahan dalam urusan pemerintahan dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 . Daerah diberikan keleluasaan mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, ini untuk pertama kalinya Undang-Undang tentang pemerintahan desa terintegrasi dengan Undang-Undang pemerintahan daerah. Pemberian sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan langkah awal dalam rangka mempercepat kemajuan dan perkembangan daerah yang kemudian disempurnakan lagi dengan UU Nomor 32 tahun 2004. Perlu dipahami hal ini terjadi karena pemerintah daerah lebih mempunyai hubungan kedekatannya

dengan masyarakat yang merupakan suatu faktor penunjang dalam pembangunan daerah.

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah provinsi yang kemudian dalam setiap daerah provinsi ada kabupaten/kota dan dalam setiap kabupaten/kota ada satuan pemerintah terendah yaitu desa dan kelurahan. Sebagai satuan pemerintahan yang terendah dan memiliki otonomi tersendiri, desa memiliki peranan yang sangat penting mengingat jumlah desa yang sangat banyak. Data terakhir jumlah desa di Indonesia dari Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri tahun 2007 adalah 65.189 desa sedangkan kelurahan berjumlah 7.878 kelurahan (dalam Nurcholis, 2011:2). Ini artinya bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar 89 % berupa pemerintahan desa dan hanya sekitar 11 % berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa harus dilakukan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan. Melihat kedudukannya yang penting dalam pencapaian pembangunan nasional ataupun lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Indonesia, tentunya desa harus dikelola dengan baik pula. Kepala desa ataupun sebutan sesuai dengan ciri khas masing-masing desa lainnya yang merupakan pucuk pimpinan dalam pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan. Tentunya hal ini memberikan kewenangan

yang cukup luas dalam pengelolaan terhadap desa. Oleh karenanya untuk menetapkan perturan bersama kepala desa serta sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu dapat dibentuk lembaga lain yang ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan desa.

Usaha untuk pembangunan desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam prakteknya peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun dalam peningkatan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai referensi mengatakan bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana memperbaiki kondisi sosial dan desa yang selama ini sudah terlalu identik dengan keterbelakangan dan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan juga banyak bergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan atau kepemimpinan pemerintah desa atau kepala desa. Sebab pada tingkatan yang pemerintahan paling bawah, kepala desa sebagai aktor dalam menjalankan kepemimpinan berperan dalam melakukan rentetetan usaha bersama masyarakat dalam iklim demokratis untuk perbaikan dalam segala aspek kehidupan di desa.

Tidak dapat dipungkiri kepemimpinan kepala desa sebagai administrator di dalam pembangunan memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan desa dan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya. Konsekuensi dari kenyataan tersebut kepala desa harus mampu melaksanakannya dengan memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan wewenang yang diberikan UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Pembangunan di desa akan sangat membantu masyarakat jika dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan desa bersangkutan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya pembangunan jembatan, pengaspalan jalan yang tentunya akan memudahkan akses masyarakat yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan meningkatkan perekonomian masyarakat. Konsekuensinya kepala desa harus mampu melayani dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa melalui pengoptimalan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat. Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pembangunan desa, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana kepala desa sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya. Pelaksanaan pembangunan sangat diharapkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya hendaknya kepala desa selalu berupaya mewujudkan harapan-harapan masyarakat dalam pelayanan pembangunan

agar dirasakan mamfaatnya terlebih desa yang memiliki potensi dan sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan.

Jadi, dapat dipahami akan pentingnya peranan kepala desa bagi masyarakat desa khususnya didalam pembangunan. Sebagai administrator pembangunan kepala desa berperan melakukan rentetan usaha bersama masyarakat dalam iklim demokratis untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan tata kehidupan serta sarana kehidupan, demi pencapaian kesejahteraan masyarakat di desanya. Kepala Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun merupakan satu dari puluhan ribu kepala desa atau sebutan lainnya yang menjalankan peranannya sebagai administrator pembangunan di desanya yang mana desa selalu diidentikan dengan keterbelakangan dan kebodohan. Oleh karenanya peranan kepala desa sangat strategis dalam menyelenggarakan berbagai urusan desa yang sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2010 yaitu :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan
- b. Menyelenggarakan urusan pembangunan
- c. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa
- d. Menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat

Kedudukan sebagai kepala desa sangat diharapkan dalam mengarahkan dan memajukan desa melalui pelaksanaan berbagai urusan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Tidak kalah penting

tentunya dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut harus melibatkan masyarakat. Karena masyarakat selain sebagai objek di dalam pembangunan juga merupakan subjek dalam pembangunan. Oleh karenanya kepala desa harus mampu mengembangkan hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama-sama.

Dalam pembangunan biasanya masyarakat desa akan berpikir mengarah ke pembangunan fisik, padahal pembangunan fisik bukan sepenuhnya ukuran majunya sebuah desa. Pembangunan fisik yang dibuat dengan partisipasi aktif masyarakat tentunya memiliki nilai tambah tersendiri yang dapat mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel I.1**  
**Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan**  
**Tebing Kabupaten Karimun tahun 2012**

No	Perencanaan Pembangunan	Keterangan Lokasi	Terealisasi	Tidak Terealisasi
1.	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, 22 rumah	Dusun I Dusun II	50%	50%
2.	Pembangunan Drainase 1000 m	Dusun I	60%	40%
3.	Pembangunan Jembatan Desa	Dusun I	100%	0%
4.	Pembangunan Tambatan Perahu Nelayan 150mx2m	Dusun I	20%	80%
5.	Pembangunan 2 lokal PAUD	Dusun II	100%	0%

*Sumber : Kantor Desa Pongkar, 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa pembangunan yang ada di Desa Pongkar pada tahun 2012. Data tersebut menunjukan pembangunan yang terealisasi dan tidak teralisasi. Pertama adalah pembangunan rumah tidak layak huni, dari 22 rumah yang direncanakan, hanya separuh yang terelaisasi. Program ini adalah bantuan dari pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Informasi yang penulis dapatkan Pemerintah Desa Pongkar terlambat dalam memberikan rekomendasi pembangunan rumah tidak layak huni ke pihak kecamatan. Kemudian pembangunan drainase 1000 meter, yang teralisasi 600 meter dan tidak terealisasi 400 meter, pembangunan ini didanai dari bantuan pihak ketiga yaitu perusahaan yang pengerjaannya diserahkan kepada masyarakat desa melalui pemerintah desa, pembangunan drainase tidak sesuai dengan yang direncanakan, sebagai akibat dari pengerjaan proyek yang kurang maksimal serta terkesan seadanya yang dipicu juga oleh kurangnya pengawasan kepala desa dalam pelaksanaannya. Kemudian pembangunan jembatan desa yang pengerjaannya telah rampung akhir 2012 yang dibiayai dari bantuan pihak ketiga. Selain itu pembangunan tambatan perahu nelayan yang awalnya direncanakan 150 meter x 2 meter hanya terealisasi 20% atau  $\pm$  30 meter x 2 meter yang juga didanai dari bantuan pihak ketiga, namun tidak teralisasi karena kurangnya swadaya masyarakat baik itu harta maupun tenaga. Terakhir ada pembangunan yang terealisasi dengan baik yaitu pembangunan 2 lokal Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD) di dusun II yang didanai sepenuhnya dari bantuan pihak ketiga.

Pembangunan fisik yang ada di Desa Pongkar pada tahun 2012 hampir semuanya dibiayai dari bantuan pihak ketiga yaitu perusahaan swasta sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan mengakibatkan minimnya swadaya masyarakat. partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting, mengingat dengan berpartisipasi baik itu ide, tenaga dan harta maka pembangunan akan lebih dirasakan masyarakat, bahkan masyarakat akan lebih merasa memiliki. Namun pemerintah desa dalam hal ini kepala desa terkesan tidak berupaya untuk memperbaiki keadaan ini. Partisipasi masyarakat sebagai syarat sukses dalam pembangunan melalui proses pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal berjalan. Perlu usaha konkret dari kepala desa terutama melakukan pembangunan dengan swadaya masyarakat.

Pembangunan di desa akan berhasil jika dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat secara optimal melalui proses pemberdayaan. Masyarakat di desa tidak selayaknya hanya berpangku tangan ketika proses pembangunan berjalan. Kontribusi masyarakat baik itu ide, tenaga dan harta sangat diperlukan untuk perbaikan bersama menuju kesejahteraan bersama. Namun kenyataannya masyarakat Desa Pongkar seperti acuh tidak acuh terhadap pembangunan yang ada, misalnya dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan hanya sedikit masyarakat yang datang, hal ini diperparah dengan kurangnya respon kepala desa untuk memperbaiki keadaan, kepala desa sendiri jarang hadir dalam kegiatan seperti ini.



Kondisi sosial budaya masyarakat yang sudah mulai terkikis dengan perubahan zaman dan arus globalisasi mengakibatkan sikap masyarakat menjadi apatis. Ciri khas desa yang identik dengan tradisi adat dan kebudayaan sudah jauh memudar. Selain itu nilai-nilai keagamaan yang merupakan poin penting yang harus dibenahi pun kurang mendapat perhatian kepala desa. Sebagai mitra kerja pemerintah desa, Lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) perlu diberdayakan dengan baik untuk memperbaiki kondisi masyarakat desa. Kepala desa sebagai pucuk pimpinan di pemerintahan desa harus mampu menggerakkan potensi-potensi seperti ini untuk diajak bekerja sama dan bersama-sama menuju perbaikan sosial budaya masyarakat. Namun sangat disayangkan organisasi kemasyarakatan ini tidak difungsikan dengan baik. Khususnya Karang taruna dan LPMD di Desa Pongkar yang berjalan dengan kurang baik. Khusus karang taruna semenjak dibentuk belum ada kejelasan dalam pengurusan serta kegiatan yang hampir tidak ada. Kepala desa sebagai pucuk pimpinan juga memiliki kewajiban dalam memberdayakan dan memaksimalkan potensi-potensi Lembaga Kemasyarakatan ini.

Untuk perbaikan ekonomi masyarakat dan desa, Pemerintah Desa Pongkar juga pernah membentuk Usaha Ekonomi Desa dalam bidang jasa penyaluran pasir pada tahun 2011. Sebagai salah satu mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Pongkar, seharusnya ini menjadi tumpuan harapan dan kemudahan bagi masyarakat dalam menyalurkan pasirnya, namun

kenyataannya saat ini UED tersebut sudah tidak beroperasi lagi karena mengalami kegagalan hanya beberapa bulan saat dibentuk. Selain itu pemanfaatan tanah kas desa oleh pemerintah desa untuk berkebun yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat juga menemui kegagalan. Pasar desa sebagai perencanaan yang dibuat pemerintah desa belum ada kejelasan mengenai langkah-langkah yang telah diambil.

Tujuan pembangunan akan tercapai jika didukung administrasi yang baik. Dalam hal ini kepala desa sebagai penyelenggaran urusan pemerintahan harus mampu membangun administrasi pemerintahan yang baik. Administrasi pemerintahan yang baik adalah yang mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Keadaan demikian belum dijumpai di pemerintahan Desa Pongkar. Fenomena yang penulis tangkap kepala desa belum mampu menyelenggarakan pelayanan masyarakat dengan maksimal karena jarang kepala desa berada di kantor. Keberadaan kepala desa juga terkadang tidak diketahui oleh aparat desa sendiri. Hal ini tentu mengakibatkan terkendalanya pelayanan dan sebagai akibatnya lagi aparat desa lainnya juga tidak maksimal dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Hal ini terbukti dari kurangnya disiplin aparat desa dalam menjalankan tugas, bahkan ketika sehabis jam makan siang terkadang kantor desa sudah terlihat kosong, padahal jam kerja belum usai. Sebagai pucuk pimpinan di pemerintahan desa, kepala desa tentunya mempunyai peranan penting serta tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan pembangunan di desa. Berbagai

macam masalah dan kendala diatas mengindikasikan kepala desa kurang memainkan peranannya.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“Peranan Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun”**.

## **I. 2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun?
2. Apa saja hambatan-hambatan kepala desa dalam menjalankan peranannya sebagai administrator pembangunan?

## **I. 3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui hambatan Kepala Desa Pongkar dalam menjalankan peranannya sebagai administrator pembangunan.

## **I. 4 Mamfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki mamfaat yaitu :

1. Secara Praktis Sebagai bahan masukan bagi Kepala Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun maupun pemerintahan desa

lainnya guna mengetahui dan memahami tentang peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan.

2. Secara akademis dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah bagi civitas akademika khususnya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, menulis membaginya kedalam enam bab sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data dan analisa data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah, kondisi penduduk dan struktur organisasi lokasi penelitian

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **1.1 Administrasi Pembangunan**

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009: 4). The Liang Gie (dalam Pasolong, 2011:3) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang didalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Pasolong (2011:3) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu :

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan;
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta;
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008:134) pembangunan berasal dari kata “bangun” yang artinya bangkit, berdiri sedangkan pembangunan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membangun. Menurut Awang (2010:21) Pembangunan merupakan sebuah konsep yang mengandung arti upaya terencana yang dilakukan sekelompok orang dalam melakukan perubahan kearah yang modern.

Pembangunan menurut Siagian (2009: 4) didefenisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan yaitu pembangunan merupakan suatu proses, pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per definisi* bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program

pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah 'bagaimana' meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan (Suharto, 2006:4).

Selanjutnya Todaro (dalam Suharto, 2006:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat;
- b. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan;
- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Dapat dipahami proses pembangunan selalu diupayakan untuk kearah yang positif serta lebih maju dari sebelumnya. Dalam membangun tentunya tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Perlu usaha-usaha secara sadar, pengorbanan dan proses yang memakan waktu serta harus dilalui dengan



kerjasama semua pihak yang terlibat. Upaya-upaya sadar yang dikaitkan dengan negara untuk melakukan perbaikan dikenal dengan administrasi pembangunan.

Siagian (2009:5) mendefenisikan administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Administrasi pembangunan yaitu proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara / pemerintah untuk merealisasi pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam segala aspek kehidupan bangsa (Tjokroamidjojo, 1995 : 33). Mostopadidjaya dalam Afiffudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Dari pengertian administrasi pembangunan diatas dapat dipahami sangat penting pembangunan untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Afiffuddin (2010:64) fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam

rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain yaitu :

- a. Ciri pokok pertama, adalah orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik;
- b. Ciri pokok yang kedua, adalah administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Jika dimasukkan administrasi pembangunan dalam konteks desa menurut Siagian maka dapat dipahami administrasi pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh desa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan desa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Kegiatan pembangunan di desa dalam Jayaditana (2006:87) meliputi bidang ekonomi, sosial, fisik dan prasarana dan pemerintahan.

Administrator adalah orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur. Ia merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi dasar atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional (Silalahi, 2002:21). Jadi administrator pembangunan dapat diartikan secara

sederhana yaitu orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan pembangunan. Sesuai dengan penelitian ini maka kedudukan dan posisi puncak yang di maksud adalah kepala desa.

Kepala desa sebagai administrator pembangunan harus mampu mengemban amanah untuk memperbaiki keadaan desa dengan berbagai program yang sifatnya membangun. Menurut Kartono (2006:325) administrator pembangunan bertugas melakukan rentetan usaha bersama rakyat atau masyarakat dalam iklim demokratis untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan tata kehidupan serta sarana kehidupan, demi pencapaian kesejahteraan, kebaikan serta keadilan merata.

Administrator pembangunan dalam kaitan menjalankan tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Suharto (2006 : 7) kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam pencapaian tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat berbentuk berupa program-program yang disusun. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai program. Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

## 1.2 Otonomi Daerah

Desentralisasi atau yang dikenal otonomi daerah sangat populer di Indonesia pasca bergulirnya reformasi. Daerah diberikan kewenangan (*authority*) untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa harus dikomandoi oleh pusat. Makna mengatur ialah melahirkan berbagai bentuk kebijakan atau peraturan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan berlandaskan adat dan kebudayaan atau kearifan lokal yang dimiliki, selanjutnya makna mengurus ialah menyediakan pelayanan, baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Muslim dalam Jurnal El-Riyasah , 2011:43).

Secara umum, otonomi daerah dapat dikatakan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autonomos*, yang berarti pengaturan sendiri/keputusan sendiri (*selfrulling*). Otonomi sebenarnya tidak hanya hak, melainkan juga kewajiban yang harus dijalankan (Riady, 2004:345). Jadi dapat dikatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang 34 Tahun 2004 mengatur tentang pemerintahan di daerah serta didalam undang-undang ini juga diatur mengenai pemerintahan desa. Mengenai otonomi daerah didalamnya dijelaskan yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam undang-undang tersebut mendefinisikan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada aparat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/ atau pemerintahan desa. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

### **1.3 Otonomi Desa**

Dalam membicarakan masalah otonomi, desa menjadi bagian tak terpisahkan. Otonomi desa yang dikenal sebagai hak yang dikenal untuk

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan didalam pengelolaan sumber daya alam yang bermamfaat dan sumber daya manusia yang ikut serta membangun desa. Kata “ desa” sendiri berasal dari bahasa india yakni “*swadesi*” (dalam Wasistono, 2007:7) yang berarti tempat asal, Tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Desa adalah suatu wilayah yang didiami sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umunya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota (Nurcholis, 2011:4). Selanjutnya Soetadjo dalam Nurcholis (2011: 12) menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Widjaja (2003: 165), otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Kemudian dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, dijelaskan bahwa otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat

setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 12, disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa desa memiliki keistimewaan tersendiri. Karena jika dibandingkan dengan otonomi daerah propinsi, kabupaten/kota yang otominya diberikan oleh pemerintah atau secara formal melalui sistem desentralisasi sedangkan desa memiliki otonomi yang asli yang jauh lebih dulu telah ada sebelum negara ini ada. Data terakhir jumlah desa di Indonesia menurut Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri tahun 2007 (dalam Nurcholis, 2011:2) adalah 65. 189 desa sedangkan kelurahan berjumlah 7. 878 kelurahan. Ini artinya bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar 89 % berupa pemerintahan desa dan hanya sekitar 11 % berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan.

Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak dijangkau sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan (Nurcholis, 2011:2).

Keperluan otonomi desa, disamping memang sudah ada melekat pada desa bersangkutan, juga merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnik, budaya dan tuntutan yang beraneka ragam dari masing-masing desa. Sehingga dengan adanya otonomi desa diperoleh kesempatan yang luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala serta memperbesar akses setiap warga desa untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya ataupun sebaliknya memenuhi kebutuhan desa secara tepat (Awang, 2006:33).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan



pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa genekologis yaitu dengan yang bersifat administratif ataupun alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Selanjutnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten /kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Landasan pemikiran mengenai pengaturan desa disebutkan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 yaitu :

- a. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- b. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
- c. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
- d. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
- e. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Desa merupakan subyek hukum, Talizuduhu Ndraha dalam Nurcholis (2011:21) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan

subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya;
- b. Menjalankan pemerintahan desa;
- c. Memilih kepala desa;
- d. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri;
- e. Memiliki tanah sendiri;
- f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
- g. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa);
- h. Menyelenggarakan gotong royong;
- i. Menyelenggarakan peradilan desa;
- j. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan desa.

Menurut Awang (2010:53) penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa itu sendiri, baik untuk menetapkan suatu kebijakan maupun untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri yang didasarkan pada kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal setempat. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam

pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabnya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyatakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

#### **2.4 Pembangunan Desa**

Pembangunan desa pada masa orde baru dilandasi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979, banyak referensi mengatakan bahwa pembangunan masa ini justru menghancurkan sendi-sendi kekuatan desa itu sendiri sebagai daerah yang otonom. Sebagai agen terdepan dan menyentuh serta berinteraksi langsung dengan masyarakat, desa harus benar-benar diperhatikan dengan melakukan pembangunan dan penguatan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang mana desa selalu diidentikan dengan keterbelakangan.

Dalam Syafrudin (2010:32) dijelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini mendapatkan kritikan karena penyeragaman (Uniformitas), nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa. Padahal, dalam merumuskan arah kebijakan (*legal policy*), pemerintahan desa perlu pengakuan dan penghormatan terhadap asal-usul yang bersifat istimewa pada eksistensi desa, yakni dengan memperbolehkan penggunaan nama seperti dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij dan lain sebagainya, yang bentuk, susunan maupun mekanisme pemerintahan didasarkan pada adat istiadatnya masing-masing. Sangat banyak keinginan yang menghendaki agar institusi yang disebut desa jangan diseragamkan karena keadaan desa-desa di Indonesia berbeda-beda, tidak bisa disamakan desa-desa di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya dan seterusnya.

Setelah reformasi bergulir UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang desa ini akhirnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengintegrasikan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dalam satu produk hukum. Undang-Undang ini lebih memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya. Kurang lebih 5 tahun setelahnya lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Subtansi Undang-Undang ini hampir sama dengan Undang-Undang sebelumnya. Keduanya telah menginternalisasi pemerintahan desa yang integral dari pemerintahan daerah dalam satu Undang-Undang.

Menurut Syafrudin (2010:33) satu hal yang menarik tidak pernah dilakukan dan ada dalam sejarah hukum pemerintahan desa di Indonesia baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan adalah untuk pertama kalinya jabatan sekertaris desa diharuskan (diangkat) dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Ali Hanapiah Muhi (2011:4) Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Berbicara tentang pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Menurut Ali Hanapiah Muhi (2011:4) secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani. Pembangunan desa dalam aspek fisik yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (*hardware* berupa sarana dan prasarana

pendidikan, dan *software* berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa.

Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marginal agar dapat melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2005:169) adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Fungsi Pemerintah baik pusat, daerah maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri dari pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (Nurcholis, 2011:103). Dalam konteks desa pencapaian tujuan pembangunan yang efektif bagi desa harus disertai dengan partisipasi masyarakatnya.

Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang memiliki hubungan lebih dekat dan harmonis dengan masyarakatnya. Mengingat masyarakat desa memiliki hubungan kekerabatan dan/atau hubungan sosial, ekonomi dan keamanan yang menciptakan ikatan lahir batin di antara masyarakatnya.

Selanjutnya Nurcholis (2011:104) menyatakan pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Widjaja (2005:95) setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya oleh sebab itu pembangunan di desa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintah desa yang telah diberikan kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil dari pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri daripada sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu menurut Ali Hanapiah Muhi (2011:8) pembangunan desa dalam aspek pembangunan fisik, pembangunan prasarana dan sarana di daerah pedesaan semestinya menempatkan penduduk atau masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan menunjukkan bahwa masyarakat daerah pedesaan berperan sebagai pelaku pembangunan. Sudah semestinya masyarakat sebagai pelaku pembangunan mengambil posisi



untuk berperan secara aktif dalam proses pembangunan. Peran aktif masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk keterlibatan atau pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, apakah pada tahap pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan atau pada semua tahap proses pembangunan tersebut.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang penting bagi keberhasilan suatu kegiatan pembangunan yang menuju kepada kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang lebih baik. Wang (dalam Awang, 2006:61) mendefenisikan partisipasi sebagai proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang ataupun oleh kelompok sebagai pernyataan kepentingan mereka untuk menyumbangkan tenaga dan sumber daya lainnya kepada institusi sosial dan sistem yang mengatur kehidupan mereka.

Lebih jauh Wang mendefenisikan partisipasi terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. *Voluntary participation*; partisipasi secara sukarela dan parsipasi yang berasal dari masyarakat sendiri. Derajat partisipasi berkaitan dengan tingkat pendidikan warga masyarakat. artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka partisipasi secara sukarela akan semakin tinggi pula.
2. *Induced participation*; partisipasi setengah-setengah yaitu sebagian berasal dari pemerintah dan sebagian lagi dari swadaya masyarakat.

3. *Forced participation*; partisipasi yang dipaksakan atau disebut juga dengan mobilisasi.

Kemudian Awang (2006:62) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam segala kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai pemeliharaan dan pengawasan yang diselenggarakan di desa dengan cara memberikan sumbangan baik berbentuk materil seperti uang, barang dan tenaga, maupun dalam bentuk spiritual seperti pemikiran dan gagasan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

## **2.5 Peranan Kepala Desa**

### **2.5.1 Pengertian Peranan**

Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1051) yaitu : bagian yang dimainkan seorang pemain (di film, sandiwara, dsb); tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Beberapa pengertian tentang peranan, pertama menurut Thoha (2006:10) peranan dirumuskan sebagai perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Menurut Soekanto (2005:212) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Kemudian ia menyatakan pengertian peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dapat dipahami peranan ada karena adanya sebuah kedudukan ataupun posisi seseorang. Kedudukan yang dimaksud bisa dalam berbagai organisasi maupun struktur sosial. Kepala desa adalah seorang pemimpin. Dengan kedudukannya sebagai pemimpin ia diharapkan bisa menjalankan peran

kepemimpinannya. Menurut Rivai (2006:148) Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Jadi dapat dinyatakan bahwa peranan kepala desa adalah perilaku yang teratur dan timbul karena kedudukan atau posisinya dalam memimpin desa

### **2.5.2 Tugas dan Fungsi Kepala Desa**

Kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa yang berkedudukan sebagai pemimpin pemerintah desa. Sebagai pemimpin pilihan masyarakat, kepala desa tentunya memiliki kemampuan atau dianggap mampu oleh masyarakat dalam kepemimpinannya menjalankan roda pemerintahan di desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang selanjutnya pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah.

Menurut George R. Terry dalam Kartono (2006:57) kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan kelompok. Orway Tead menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya Howard H. Hoyt mendefinisikan kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan untuk membimbing orang.

Kemudian Kartono (2006:57) menyimpulkan bahwa kepemimpinan itu terdapat unsur-unsur yaitu :

- a. Kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau orang lain;

- b. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain;
- c. Untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Menurut Thoha (2006:121) kepemimpinan adalah aktifitas untuk memengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Orang yang menjalankan kepemimpinan selanjutnya disebut pemimpin. Pemimpin memiliki peranan penting dalam suksesnya pencapaian tujuan suatu kelompok/ organisasi. Oleh karenanya Kartini Kartono dalam Pasolong (2011:114) kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting yaitu :

- a. Kekuasaan yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu;
- b. Kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
- c. Kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Menurut Widjaja (2005:31) kepemimpinan secara umum merupakan kemampuan seseorang (pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap

pengambilan keputusan. Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya kepala desa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap berhasil atau tidaknya pembangunan suatu desa. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang diatur kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 tahun 2010 kepala desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa;
- b. Menyelenggarakan urusan pembangunan, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa;
- c. Urusan administrasi umum dan keuangan, yaitu melaksanakan pengendalian surat-surat masuk dan keluar serta pencatatan administrasi keuangan desa;
- d. Menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, kepala desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala desa dilarang melakukan tindakan yang telah dilarang peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;



- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada

masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Dapat dipahami akan beratnya tugas dan pentingnya kedudukan kepala desa dalam sebuah desa. Kemampuan kepemimpinan kepala desa cukup menentukan akan keberhasilan desa dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya kepala desa harus mempunyai sifat yang mencerminkan jiwa kepemimpinan yang baik.

Menurut Kartono (2006:328) sifat-sifat kepemimpinan yang unggul adalah berani, tegas, kaya akan inisiatif, peka terhadap lingkungan dan bawahan, mampu menjalin komunikasi yang akrab, berani mengambil keputusan dan resiko, bertanggung jawab dan konsekuen, bersikap terbuka, jujur dan mempunyai prinsip-prinsip yang teguh.

Kepemimpinan memiliki fungsi-fungsi dalam usaha untuk pencapaian tujuan. Menurut Rivai (2006:53) fungsi artinya jabatan (Pekerjaan ) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial. Selanjutnya fungsi kepemimpinan diselenggarakan dalam aktifitas kepemimpinan secara integral pelaksanaannya berlangsung sebagai berikut :

- a. Pemimpin berkewajiban menjabarkan program;
- b. Pemimpin harus mampu memberikan petunjuk yang jelas;
- c. Pemimpin harus berusaha mengembangkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat;
- d. Pemimpin harus mengembangkan kerjasama yang harmonis;

- e. Pemimpin harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai batas tanggung jawab masing-masing;
- f. Pemimpin harus berusaha menumbuh kembangkan kemampuan memikul tanggung jawab;
- g. Pemimpin harus mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali.

Koordinasi merupakan konsep dasar kedua disamping kepemimpinan, sebab koordinasi dan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena saling mempengaruhi. Koordinasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka proses pencapaian tujuan organisasi. Handoko (dalam Awang, 2010:185) mengemukakan bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Demikian juga yang diungkapkan Stower (dalam Awang, 2010:185) bahwa koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

### **2.5.3 Peranan Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya administrator adalah orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur. Ia merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi dasar atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional (Silalahi, 2002:21). Jadi administrator pembangunan dapat diartikan secara sederhana yaitu orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur yang merumuskan

kebijakan yang menjadi dasar atau pedoman dalam kegiatan pembangunan. Sesuai dengan penelitian ini maka kedudukan dan posisi puncak yang dimaksud adalah kepala desa. Menurut Kartono (2006:325) administrator pembangunan bertugas melakukan rentetan usaha bersama rakyat atau masyarakat dalam iklim demokratis untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan tata kehidupan serta sarana kehidupan, demi pencapaian kesejahteraan, kebaikan serta keadilan merata.

Peranan dapat dirumuskan sebagai perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan (Thoha, 2006:10). Peranan kepala desa dapat diartikan sebagai perilaku yang teratur dan timbul karena kedudukannya sebagai kepala desa. Perilaku yang diharapkan tentunya berdasarkan kewenangan yang ada pada posisi atau jabatan yang dimiliki. Jadi dapat dirumuskan peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan adalah perilaku yang teratur dan timbul karena posisi atau jabatannya sebagai kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator pembangunan.

Dalam Perda Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2010 dijelaskan bahwa kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa yang berkedudukan sebagai pemimpin pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, keuangan dan kesejahteraan.

Kepala Desa Pongkar sebagai administrator pembangunan tentunya bertugas melakukan rentetan usaha bersama rakyat atau masyarakat dalam iklim demokratis untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan tata

kehidupan serta sarana kehidupan, demi pencapaian kesejahteraan, kebaikan serta keadilan merata. Adapun peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan berdasarkan Perda Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2010 dapat dinyatakan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pembangunan, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa. pemberdayaan masyarakat dalam semua proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemamfaatan, dan pemeliharaan pelestarian pembangunan yang fisik
- c. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa kepala desa harus melaksanakan asas partisipatif, transparan, akuntabilitas serta tertib administrasi.
- d. Menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

## **2.6 Peran Kepemimpinan Dalam Pandangan Islam**

Kepemimpinan identik dengan istilah *khalifah* yang berarti wakil dan *amir* (yang jamaknya *umara*) atau penguasa, selain itu juga kata *Ulil Amri* (satu akar dengan kata *amir*) yang berarti pemimpin tertinggi dalam

masyarakat Islam (dalam Rivai, 2003:6-7). Pemimpin dalam Islam harus ditaati selagi pemimpin tersebut taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu (An-Nisa'(4):59)*

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia adalah pemimpin diatas bumi ini. Sesuai dengan hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari Muslim: *Setiap orang diantaramu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya.* Menurut Rivai (2003:8) berdasarkan Alquran dan hadis Rasulullah Saw dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Islam itu adalah kegiatan menuntun, membimbing , memandu dan menunjukan jalan yang diridhai Allah Subhanahuwata'ala. Islam mengajarkan agar manusia selalu berbenah diri untuk mempersiapkan diri dengan menjalankan perintah Allah dan menjahui larangan-Nya. Memilih pemimpin yang tepat merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan di dalam Islam, karena pemimpin mempunyai kemampuan untuk merubah keadaan, tergantung apakah perubahannya kearah yang baik atau sebaliknya. Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-R'ad (13) ayat 11 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri (Ar-Ra'd : 11)*

Dalam Islam kepemimpinan mempunyai dua peran penting yaitu sebagai pelayan bagi yang dipimpin dan penjaga bagi ia pimpin. Pertama seorang pemimpin harus melayani pengikutnya. Seorang pemimpin harus memberikan kesejahteraan dan membimbing pengikutnya kepada yang lebih baik. Konsep pemimpin dalam Islam dimana pemimpin sebagai pelayan masyarakat telah ada pada masa-masa awal keberadaan Islam. Kedua bahwa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw bahwa seorang pemimpin harus menjaga masyarakat dengan menentang dan melawan dan mendorong kesadaran ketuhanan, taqwa dan menegakan keadilan (Khairil Hendry dalam Jurnal El-Riyasah, 2011:70).

Islam sebagai sebuah ajaran yang lengkap tentu telah memberikan petunjuk dan garisan tentang bagaimana proses pemilihan kepemimpinan tersebut dijalankan dengan benar, dan baik, khususnya petunjuk tentang syarat dan kriteria pimpinan yang tepat untuk dipilih sebagai pimpinan umat dan bangsa untuk menuju umat dan bangsa yang adil dan sejahtera. Semua itu tentu telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah (Al-ahzab (33) : 21)*

Menurut Khairil Hendry (dalam Jurnal El-Riyasah, 2011:74) karakteristik pemimpin adalah faktor penting dalam kehidupan berkelompok

dan berorganisasi. Jika seorang pemimpin itu jujur, baik, cerdas dan amanah, niscaya rakyatnya akan makmur. Sebaliknya jika pemimpinnya tidak jujur, korup serta menzalimi rakyatnya, niscaya rakyatnya akan sengsara. Oleh karenanya Islam memberi pedoman dalam memilih pemimpin yang baik yaitu seorang yang baik dan beriman, adil, memberantas kemungkaran, serta pemimpin yang berusaha meniru sifat Nabi.

Syaifuddin Sabda (dalam <http://tarbiyah-iainantasari.ac.id>) menyatakan sifat utama yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai pemimpin terkemuka tercermin dalam empat sifat utama Rasulullah yaitu sifat shiddiq yakni selalu menampilkan dan memperjuangkan kebenaran diatas segala-galanya, Kedua, sifat amanah yakni selalu menjunjung tinggi dan menjalankan amanah baik amanah Allah dan umat, ketiga sifat pathanah, yakni memimpin dengan cerdas, arif dan penuh hikmah, keempat tablig, yakni selalu mengajak kepada kebaikan dan kebenaran dan tidak ada sesuatu yang disimpan dan ditutupi yang dalam bahasa sekarang disebut dengan transparansi. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh para Khulafaurrasyidin seperti Abu Bakar Shiddiq yang dikenal sebagai pemimpin sederhana dan adil dalam melaksanakan tugas.

Dalam Islam, pemimpin bukan saja harus piawai dalam mengatur urusan negara, tapi juga berpengetahuan luas tentang agama. Oleh karena itu idealnya seorang pemimpin negara di samping memiliki pengetahuan dan kecerdasan dalam urusan negara (politik) tetapi juga harus memiliki pengetahuan agama, sebagaimana Khulafa' al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali), Selain itu seorang pemimpin juga mesti sehat jasmani, punya pemikiran (visi dan



misi) yang jelas, serta berani dan tegas dalam bertindak. Di samping semua itu pemimpin harus adil. Pemimpin adil ialah pemimpin yang adil pada dirinya (takwa), dan adil dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah An-Nissa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (An-Nissa (4) :58)*

Adil pada dirinya (takwa) ialah pemimpin yang dekat kepada Tuhan, dirinya terhindar dari perbuatan dosa, memiliki sifat wara' yang tidak terobsesi mengejar kepentingan dunia, dan dapat dipercaya dalam memegang amanah kepemimpinan. Adil dalam kepemimpinan itu juga menghendaki adil dalam aspek sosial (keadilan sosial) dan adil dalam menerapkan hukum. Keadilan sosial itu di antaranya pembebasan kekayaan negara dari eksploitasi negara asing, menerapkan sistem perekonomian Islam, dan keadilan dalam pembagian kekayaan negara kepada semua lapisan masyarakat. Keadilan sosial itu juga diterapkan dalam mengangkat orang yang layak untuk memegang jabatan. Prilaku adil itu diterapkan dalam setiap perbuatan, perkataan, dan dalam penetapan keputusan hukum.

Singkatnya pemimpin harus mampu membina sekaligus menjadi pelindung umat dan agama. Seorang pemimpin harus taat kepada Allah swt

dan Rasul-Nya sebagai hal yang paling mendasar. Islam telah menetapkan syarat tertentu yang mesti terpenuhi pada diri seorang pemimpin, tentu semua itu dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi kita semua dalam menentukan pemimpin baik pemimpin negara maupun pemimpin dalam berbagai lini kehidupan. Sebaliknya seharusnya kita selalu sadar dan waspada sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw dalam hadis beliau: *jika suatu persoalan (termasuk urusan kepemimpinan) diserahkan kepada yang bukan ahlinya atau memenuhi persyaratan yang baik, maka tunggulah kehancurannya*. Demikian pula halnya dengan kepemimpinan kepala desa, jika bukan orang yang layak memimpin dijadikan pemimpin maka kehancuran desa sedikit demi sedikit pasti terjadi. Kepala desa menjalankan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjadi hal penting yang harus disadari kepala desa juga harus mencontoh kepemimpinan nabi, point penting dan utama yang harus dicapai dalam pembangunan, adalah pembangunan ahlak masyarakat desa dengan menghidupkan nilai-nilai keislaman.

## **2.7 Penelitian Pendahuluan**

Yayan Tri Wahyudi (2012) UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, kesimpulannya adalah fungsi pemerintah desa telah berjalan dengan cukup baik.

Dwi Ratna Ningsih (2011) UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Kesimpulannya adalah

secara keseluruhan bahwa pelaksanaan fungsi Kepala desa sebagai Administrator Pembangunan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik.

Kemudian Sarinendy (2009) UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Kesimpulannya fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Pangkalan Kuras masuk dalam katagori cukup baik.

Desniati pada (2009) UIN Suska Riau dengan judul skripsi Peranan Kepala Desa sebagai Stabilisator, Inovator dan Pelopor Dalam Pembangunan di Desa Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indra Giri Hilir dengan kesimpulannya Peranan kepala desa sebagai stabilator, innovator dan pelopor dalam pembangunan di Desa disimpulkan kurang baik.

Dari beberapa penelitian yang hampir sama dengan penulis. Namun dalam kaitan ini penulis lebih menekankan aspek peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan sesuai dengan Perda Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2010, Serta tempat penelitian penulis adalah di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

## **2.8 Defenisi Konsep**

Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989:33). Melalui konsep, peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan

menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*event*) yang berkaitan satu sama dengan lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah :

- a. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Otonomi desa yaitu merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.
- d. Kepala desa yaitu unsur penyelenggara pemerintah desa yang berkedudukan sebagai pemimpin pemerintah desa.
- e. Peranan yaitu perilaku yang timbul karena adanya kedudukan atau jabatan. Dalam penelitian ini adalah perilaku yang ditimbulkan seseorang dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa.
- f. Peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan dapat diartikan secara sederhana yaitu perilaku yang teratur dan timbul

karena posisi atau jabatannya sebagai kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator pembangun di Desa Pongkar sesuai dengan amanat PERDA Kab. Karimun No.04 Tahun 2010. Maka Indikator peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan yang dioprasionalisasikan sesuai dengan tugas yang diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2010 adalah :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa;
- b. Menyelenggarakan urusan pembangunan, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, yang dilaksanakan dengan asas partisipatif, transparansi, akuntabel dan tertib administrasi.
- d. Menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

## **2.9 Konsep Oprasional**

Konsep Operasional menurut Singarimbun (1989:46) dalam merupakan unsur yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja sebagai

pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. Adapun konsep oprasional pada penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 11.1**  
**Operasionalisasi Variabel Penelitian Peranan Kepala Desa Sebagai**  
**Administrator Pembangunan**

Defenisi Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Prilaku yang teratur dan timbul karena posisi atau jabatannya sebagai kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator pembangun sesuai dengan amanat PERDA Kab. Karimun No.04 Tahun 2010	Peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan	1.Menyelenggarakan urusan pemerintahan;	a. Menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan desa; b. Mengambil keputusan dengan melibatkan masyarakat; c. Menggerakan bawahan dalam penyelenggaraan pelayanan di desa; d. Menggerakan Lembaga Kemasyarakatan desa; e. Pengaturan desa dengan membuat peraturan bersama BPD; f. Melaksanakan peraturan desa; g. Pengawasan dalam setiap kegiatan;	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
		2.Menyelenggarakan urusan pembangunan	a. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; b. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik

			c. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan; d. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemamfaatan pembangunan; e. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan pembangunan	
		3. Menyelenggarakan Pengelolaan keuangan desa	a. Partisipatif dalam pengelolaan; b. Transparansi dalam pengelolaan; c. Mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan; d. Melaksanakan tertib administrasi;	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
		4. Menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat	a. Membina kehidupan masyarakat; b. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa; c. Membina perekonomian desa; d. Melestarikan sosial budaya dan adat istiadat; e. Menjaga keamanan dan ketertiban;	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik

Sumber: Data Olahan 2012

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah dari bulan Oktober 2012 s/d Desember 2012. Alasan pemilihan tempat di Desa Pongkar Kec. Tebing Kab. Karimun karena Desa Pongkar adalah hasil pemekaran dari Kelurahan Tebing pada tahun 2001, menarik menurut penulis melakukan penelitian di desa yang otonominya baru berkembang, selain itu dari segi waktu dan biaya penulis merasa terjangkau.

#### **1.2 Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan (Umar, 2002:84). Adapun data tersebut dalam penelitian ini berupa tanggapan responden.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat menunjang aspek yang diteliti di desa. Mengenai data yang diperoleh dari dan yang tersedia di desa yaitu data aparat pemerintahan desa, struktur organisasi dan profil Desa Pongkar.



### 1.3 Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:90). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa berdasarkan KK (Kartu Keluarga) di Desa Pongkar. Data tahun 2012 menunjukkan jumlah KK di Desa Pongkar adalah 663 KK.

#### b. Sampel

Menurut Sugiyono (2010:91) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Adapun tehnik sampel data penelitian ini menggunakan sampel acak (*random sampling*). Untuk menentukan berapa sampel yang dibutuhkan, penulis menggunakan rumus Slovin dalam penghitungan sampel (dalam Umar, 2002:141) dengan kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{663}{1 + 663(10\%)^2}$$

$$n = \frac{663}{1 + 663(0.01)}$$

$$n = \frac{663}{7.63}$$

$$n = 86,89$$

$$n = 87$$

Keterangan :  $n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = error 10% (Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel).

Jadi, dari hitungan jumlah populasi dari masyarakat berdasarkan KK adalah 663 Orang, dengan kelonggaran ketidaktelitian 10%, maka hasil penghitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 86,89. Menurut Usman (2006:11) jika pecahan yang akan dibulatkan itu lebih dari 0,05 maka pecahan tersebut dibulatkan menjadi 1. Dengan demikian maka jumlah sampel yang penulis ambil dari populasi masyarakat berdasarkan jumlah KK adalah 86,89 yang dibulatkan menjadi 87 orang.

Adapun jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.1**  
**Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian**

No.	Tehnik Pengumpulan Data	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel
1.	Kuisoner/ Angket	Masyarakat berdasarkan jumlah KK	663	87
2.	Wawancara (key Informan)	a. Kepala desa b. Sekertaris Desa c. Ketua BPD d. Tokoh masyarakat	1 1 1 2	

*Sumber : Data Olahan 2012*

### **3.4 Teknik pengumpulan Data**

#### **a. Angket (kuesioner)**

Angket (kuesioner) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respons terhadap pertanyaan tersebut (Umar, 2002:92). Adapun responden yang dimaksud adalah seluruh sampel masyarakat Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun berdasarkan pada jumlah KK.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah proses Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan (Norbuko, 2010:83). Adapun yang diwawancarai adalah kepala desa, Sekdes, ketua BPD dan 2 orang tokoh masyarakat yang diambil dari masing-masing dusun di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun sebagai key Informen pada penelitian ini.

### **1.5 Analisa Data**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara utuh dan nyata keadaan objek yang diteliti kemudian dituangkan kedalam tabel-tabel dengan angka dan persentase dan selanjutnya dianalisa.

### **b. Rumus Statistik**

Dalam menganalisis penulis akan menuangkannya dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase dengan rumusan sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

### **c. Skala Pengukuran**

Menurut Sugiyono (2010:105) skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan interval yang didistribusikan kedalam bentuk persen (dalam Usman, 2009:146) dengan alternatif sangat baik sampai dengan tidak baik.

- |                |              |
|----------------|--------------|
| a. Sangat Baik | = 81% - 100% |
| b. Baik        | = 61% - 80%  |
| c. Cukup Baik  | = 41% - 60%  |
| d. Kurang Baik | = 21% - 40%  |
| e. Tidak Baik  | = 0% - 20%   |

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Keadaan Geografis Desa Pongkar**

Nama pongkar, menurut cerita penduduk berasal dari kata “bongkar” yang pada masa dahulu, ada beberapa orang berlayar dengan melintasi selat malaka. Namun ketika diperjalanan dikarenakan ada angin kencang mereka tidak melanjutkan pelayarannya dan singgah disuatu pulau yang tidak berpenghuni. Salah seorang mengajak rombongan untuk beristirahat dan membongkar hutan sebagai tempat beristirahat dan akhirnya dijadikan sebuah perkampungan yang mereka sebut pongkar. Desa pongkar sempat direncanakan untuk dibangun sebuah bandar tepatnya oleh Inggris pada zaman Raffles. Namun, rencana terhenti setelah Raffles membangun bandar Singapura. Desa pongkar sudah sejak lama menjadi tempat pemukiman penduduk masyarakat melayu serta suku bangsa yang lainnya karena kedekatan geografis dengan negara-negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura.

Desa Pongkar termasuk desa perbatasan, Desa Pongkar berada di sebelah Barat Pulau Karimun, tepatnya di ujung Pulau Karimun yang Secara Georafis berbatas wilayah sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, dan Kabupaten Meranti, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pamak/Kelurahan Darussalam, sebelah barat berbatasan dengan Darussalam/Kel. Pasir Panjang, sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka/Perbatasan Singapura. Luas wilayah Desa Pongkar adalah 4403 Ha.

Jarak antara desa dan ibu kota kabupaten adalah 13 Km, sedangkan dengan kecamatan 9 Km.

Desa Pongkar juga memiliki pulau terluar yakni Pulau Karimun Anak dan Tokong hiu besar dan kecil yang berbatas langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Desa Pongkar juga memiliki potensi sumber daya wisata seperti pantai dan air terjun. Keberadaan Desa Pongkar yang juga sangat diuntungkan dengan keberadaan dua perusahaan pertambangan yang masih aktif yaitu PT. BGMM (Bukit Granit Mining Mandiri) dan PT.WPK (Wira Penta Kencana) yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat terutama dalam penyerapan tenaga kerja dari masyarakat Desa Pongkar khususnya dan Kabupaten Karimun umumnya.

#### **4.2 Penduduk**

Berdasarkan data statistik pada kantor Desa Pongkar Tahun 2011, penduduk Desa Pongkar berjumlah 608 KK dan keseluruhan 2299 orang/jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 1185 orang dan perempuan 1114 orang dari 608 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel IV.1**  
**Penduduk Desa Pongkar Menurut Usia dan Jenis Kelamin**

Usia	Jenis Kelamin		Frekuensi	Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan		
0 - 12 Bulan	37	30	67	2,91 %
1 - 5 Tahun	107	115	222	9,66 %
6 - 12 Tahun	219	215	434	18,88 %
12 - 19 Tahun	163	141	304	13,22 %
19 - 25 Tahun	171	175	346	15,05 %
25 - 44 Tahun	246	219	465	20,23 %
45 - 60 Tahun	211	192	403	17,53 %
60 keatas	31	27	58	2,52 %
<b>Jumlah</b>	<b>1.185</b>	<b>1.114</b>	<b>2.299</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Kantor Desa Pongkar, 2012*

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa keadaan penduduk Desa Pongkar sebanyak 1185 orang dengan persentasenya 51,54% laki-laki, kemudian perempuan 1114 orang dengan persentasenya 48,46 %. Selanjutnya dilihat dari kelompok usia 25-44 tahun merupakan kelompok usia yang paling produktif dengan jumlah 465 orang atau 20,23 %, dan jumlah yang paling sedikit adalah kelompok usia 60 Tahun keatas dengan jumlah 58 orang atau 2,52 % dari jumlah penduduk Desa Pongkar.

### 4.3 Agama Penduduk

Mayoritas penduduk Desa Pongkar adalah suku melayu yang identik dengan agama Islam, meskipun beberapa tahun terakhir sudah banyak pendatang yang berasal dari daerah lain. Berdasarkan komposisi penduduk yang ada di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.2**  
**Penduduk Desa Pongkar Berdasarkan Agama yang dianut**

No	Agama	Frekuensi	Persentase (%)
1	Islam	2288	99,52
2	Kristen	11	0,48
3	Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2299</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Kantor Desa Pongkar, 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Pongkar beragama Islam bengan jumlah 2288 orang atau 99,52%, kemudian yang beragama Kristen berjumlah 19 orang atau 0,48%, dan yang beragama lain tidak ada. Jumlah tesebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun adalah beragama Islam.

Berbicara mengenai agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tidak terlepas dari sarana dan prasarana peribadatan yang ada di Desa Pongkar, adapun sarana peribadatan yang ada di Desa Pongkar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.3**  
**Sarana Peribadatan di Desa Pongkar**

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musholla	2
3	Gereja	-
<b>Total</b>		<b>6</b>

*Sumber : Kantor Desa Pongkar, 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tempat ibadah yang berada di Desa Pongkar terdiri atas 4 masjid dan 2 mushola serta tidak terdapat Gereja. Jumlah tesebut menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun adalah beragama Islam.



Sesuai dengan mayoritas agama Islam di Desa Pongkar maka penduduknya pun mayoritas beretnis melayu, karena kedekatan geografis dengan Malaysia maupun karena faktor sejarah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV. 4**  
**Penduduk Desa Pongkar Berdasarkan Etnis**

No	Etnis	Frekuensi	Persentase (%)
1	Batak	9	0,39
2	Banjar	10	0,43
3	Flores	8	0,35
4	Jawa	158	6,87
5	Melayu	2104	91,52
6	Minang	10	0,43
<b>Jumlah</b>		<b>2299</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Pongkar, 2012*

Dominasi penduduk melayu di Desa Pongkar memang sangat mencolok berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penduduk yang beretnis melayu memiliki persentase 91,52 % , di susul Jawa 6,87 % dan sisa dari etnis lainnya yaitu 1,60 %. Tidak mengherankan jika budaya melayu selalu dipertontonkan pada acara-acara seperti pernikahan, cukur rambut dan maulud nabi, adapun budayanya seperti tepuk tepung tawar, bersanji dan marhaban, pencak silat, dalam seni musik seperti seni kompang dan rabani, tetapi dalam keseharian adat dan kebudayaan seperti ini akan sulit ditemui.

#### **4.4 Pendidikan**

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Desa Pongkar dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Mengenai pendidikan diketahui mayoritas masyarakat hanya berada pada tamatan SD dan SLTP. Namun secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat Desa Pongkar

secara umum sudah cukup baik. Sudah mulai banyak yang menamatkan SLTA dan beberapa orang diploma dan sarjana yang hendaknya diberdayakan untuk memajukan desa. Tingkat pendidikan juga berhubungan dengan fasilitas sekolah yang ada, berikut data mengenai jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Pongkar :

**Tabel IV.5**  
**Sarana Pendidikan di Desa Pongkar**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2 Buah
2	Taman Kanak-kanak	1 Buah
3	Sekolah Dasar	2 Buah
4	SLTP	1 Buah
5	SLTA	-
<b>Total</b>		<b>6 Buah</b>

*Sumber : Kantor Desa Pongkar, 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Pongkar cukup memadai untuk sebuah desa. Itu dapat dilihat dengan adanya 2 (dua) buah PAUD, 1 (satu) buah Taman Kanak-Kanak, 2 (dua) buah Sekolah Dasar Negeri. Dapatlah diambil pemahaman bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Pongkar sudah mulai kearah yang lebih baik dengan tidak banyaknya penduduk yang buta huruf karena tidak mengenyam pendidikan.

#### **4.5 Kesehatan**

Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun sudah mengalami kemajuan, ini tidak lepas dari keberadaan perusahaan yang membantu desa dalam penyediaan pelayanan kesehatan, berikut sarana kesehatan yang ada di Desa Pongkar :

**Tabel IV.6**  
**Sarana Kesehatan Desa Pongkar**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Bantuan	1
2	Posyandu	4
<b>Total</b>		<b>5</b>

*Sumber : Kantor Desa Pongkar, 2012*

Adanya Puskesmas Bantuan dan Posyandu tentunya sangat membantu masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan seperti cek kesehatan, Keluarga Berencana, pemeriksaan kehamilan sampai proses persalinan, dan pemeriksaan kesehatan masyarakat lainnya.

#### **4.6 Mata Pencaharian**

Desa Pongkar merupakan daerah yang terletak pada daerah pesisir laut dan perbukitan. Daerah perbukitan ini mengandung bebatuan. Potensi alam bebatuan ini dijadikan sebagai daerah pertambangan bagi perusahaan asing. Adapun mata pencarian penduduk Desa Pongkar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV.7**  
**Mata Pencaharian Penduduk di Desa Pongkar**

No	Mata Pencaharian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Petani	60	5,80
2	PNS	30	2,90
3	Pedagang	38	3,67
4	Nelayan	100	9,66
5	Karyawan Swasta	262	25,31
6	Buruh Harian Lepas	510	49,28
7	Pertukangan	30	2,90
8	Pensiunan	5	0,48
<b>Jumlah</b>		<b>1035</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Kantor Desa Pongkar, 2012*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk Desa Pongkar adalah bermata pencaharian sebagai buruh lepas yakni sebanyak 510 orang atau 49,28 %. Karyawan swasta sebanyak 262 orang atau 25,31 % , menyusul nelayan sebanyak 100 orang atau 9,66 %, petani 60 orang atau 5,80 %, dan berikut secara berturut-turut pedagang, PNS, pertukangan dan pensiunan. Penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta menjadi primadona di sini, karena telah diangkat oleh perusahaan swasta bagi penduduk telah menjamin masa depan. Buruh lepas sebagian besar juga bekerja untuk perusahaan namun hanya sebagai pekerja harian (harian lepas), selain itu juga termasuk penduduk yang bekerja sebagai penambang pasir/batu sendiri.

#### **4.7 Pemerintahan**

Desa Pongkar merupakan merupakan hasil dari pemekaran Kelurahan Tebing berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001 tentang pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja yang berisikan Kabupaten dimekar menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, 19 ( Sembilan belas) Kelurahan dan 25 ( dua puluh lima ) Desa. Kemudian di Desa Pongkar dibentuk 2 (dua) Dusun, empat (4) RW dan 10 ( sepuluh) RT, dan pada akhir tahun 2009 telah dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Dusun 4 (empat) RW dan 11 (sebelas) RT. Berarti Pongkar telah mempunyai pemerintahan sendiri, adapun sarana pemerintahannya sekarang sudah cukup baik, dapat dilihat berupa sarana gedung berikut ini :

**Tabel IV.8**  
**Sarana Pemerintahan Desa Pongkar**

<b>No</b>	<b>Sarana Pemerintahan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kantor Desa	1
2	Kantor BPD	1
3	Balai Pertemuan	1
4	Poskamling	4
<b>Total</b>		<b>3</b>

*Sumber : Kantor Desa Pongkar, 2012*

Secara umum sarana gedung pemerintahan Desa Pongkar sudah memadai, yang tentunya dengan fasilitas gedung yang ada diharapkan kinerja aparat pemerintahan akan maksimal. Penyelenggaraan pemerintahan desa juga sangat terbantu dengan adanya bantuan pihak ketiga seperti perusahaan asing yaitu PT. Granit Mining Mandiri dan PT. Wira Penta Kencana. Keberadaan perusahaan ini membantu desa dalam melaksanakan program-program pembangunan, khususnya pembangunan fisik. Keuangan desa yang tidak seberapa karena Alokasi Dana Desa dari pemerintah belum berjalan, memaksa pemerintah desa dan masyarakat banyak menggantungkan harapan kepada dua perusahaan ini. Desa juga mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah, hanya saja bukan dalam bentuk ADD, selain itu retribusi masuk ke tempat wisata juga menjadi pemasukan desa, biaya administrasi dalam pelayanan juga menjadi pemasukan desa.

#### **4.7.1 Profil Kepala Desa Pongkar**

Desa Pongkar dipimpin oleh Bapak Zulkarnaen selaku Kepala Desa Pongkar periode 2008-2013 yang merupakan penduduk asli. Adapun biodata Kepala Desa Pongkar adalah sebagai berikut :

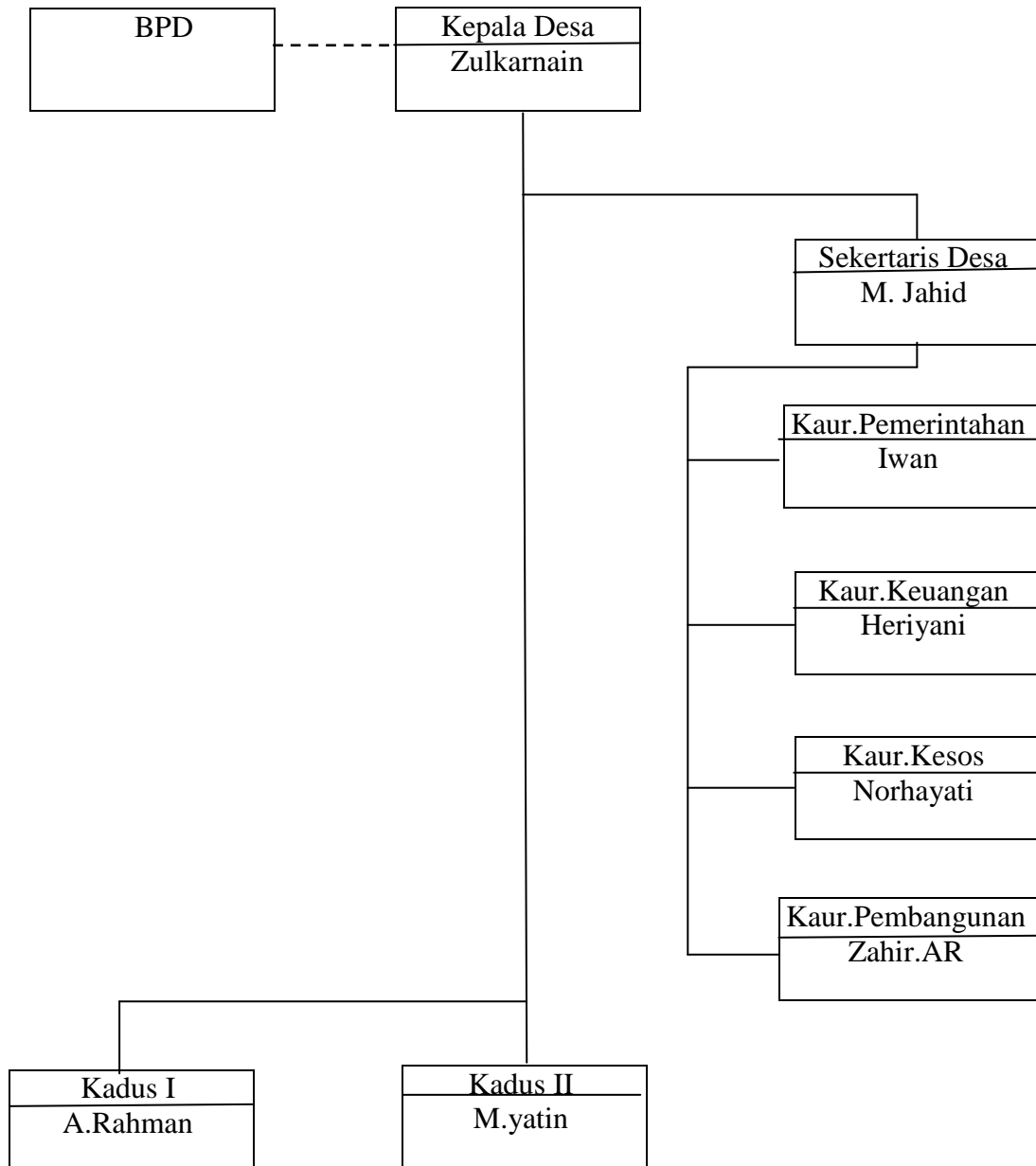
Nama : Zulkarnain  
 Tempat/Tanggal lahir : Pongkar, 28 Februari 1968  
 Pendidikan Terakhir : Sekolah Tehnik Menegah (STM)  
 Agama : Islam  
 Suku : Melayu  
 Alamat : Pongkar RT 03/RW 02

Bapak Zulkarnain merupakan ayah dari 3 (tiga) orang anak. Adapun pengalaman beliau sebelum menjabat sebagai kepala desa adalah karyawan pada Perusahaan PT. Granit. Dia menjadi kepala desa semenjak Desa Pongkar dimekarkan dari Kelurahan Tebing. Masa jabatan beliau akan berakhir Januari 2013. Ini berarti beliau telah dua priode memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun pelatihan yang beliau ikuti setahun terakhir dapat penulis rincikan, yaitu Latihan Kepemimpinan yang diadakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 2011, Bimbingan Teknis Manajemen Administrasi Desa 2012, dan terakhir Bimtek pengelolaan Alokasi Dana Desa 2012.

#### **4.7.2 Tugas Fungsi Aparat Pemerintah Desa**

Sebelum mengetahui tugas dan fungsi aparat pemerintah desa, perlu mengetahui struktur organisasinya. Dalam pembahasan ini penulis tidak mencantumkan tugas dan fungsi kepala desa karena telah dibahas pada Bab II yang mana tugas dan fungsi kepala desa berhubungan erat dengan peran yang dimainkannya. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Pongkar dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pongkar Kecamatan Tebing**  
**Kabupaten Karimun**



*Sumber : Kantor Desa Pongkar, 2012*

Adapun mengenai aparat Desa Pongkar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

**a. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan kepada kepala desa. Untuk tugas-tugas antara lain :

- a) Mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa;
- b) Menyelenggarakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum;
- c) Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan;
- d) Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk pembinaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- e) Menyusun laporan dibidang keuangan;
- f) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**b. Kepala Urusan Pemerintahan**

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas antara lain :

- a) Menyusun rencana kerja dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum;
- b) Menyusun rencana kerja dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c) Menyusun rencana kerja dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;



- d) Menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan pengadministrasian bidang pemerintahan sipil;
- e) Menyusun rencana kerja dan membantu melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- f) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**c. Kepala Urusan Umum**

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas antara lain :

- a) Melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan;
- b) Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atas naskah-naskah lainnya;
- c) Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
- d) Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa;
- e) Menyenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa;
- f) Melaksanakan pengelolaan buku administrasi umum;
- g) Mencatat inventarisasi kekayaan desa;
- h) Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;

- j) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**d. Kepala Urusan Keuangan**

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas antara lain :

- a) Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Mengumpulkan dan menganalisa data sumber pengasilan desa baru untuk dikembangkan;
- c) Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa;
- d) Melakukan kegiatan adminisrasi keuangan desa;
- e) Merencanakan penyusunan Anggara Belanja Desa untuk dikonsultasikan dengan BPD;
- f) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**e. Kepada Urusan Kesejahteraan Masyarakat**

Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat;
- b) Menyusun rencana kerja dalam melakukan pembinaan di bidang keagamaan, Keluarga Berencana, kesehatan, dan pendidikan masyarakat;
- c) Menyusun rencana kerja dan dan melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga dan organisasi yang ada di atas;

- d) Menyusun rencana kerja dalam membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sadaqoh;
- e) Menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan masyarakat;
- f) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**f. Kepala Dusun**

Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa di wilayah kerjanya sebagai berikut :

- a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
- b) Pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
- c) Pembinaan dan kerukunan warga;
- d) Meningkatkan swadaya gotong royong;
- e) Melakukan penyuluhan program pemerintahan;
- f) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh kepala desa.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Identitas Responden**

##### **5.1.1 Jenis Kelamin Responden**

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.1**  
**Jenis Kelamin Responden**

<b>No</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	Laki-Laki	67	77,01
2.	Perempuan	20	22,99
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 87 orang, yang keseluruhannya terdiri dari 67 responden laki-laki atau 77.01%, sedangkan responden perempuan sebanyak 20 responden atau 22.99%. Jadi jumlah keseluruhan jumlah responden yang dijadikan sampel dari masyarakat Desa Pongkar adalah 87 orang.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 67 orang atau 77,01%, dan kebanyakan responden yang diambil untuk sampel penelitian ini adalah dari kepala keluarga. Alasan penulis lebih banyak mengambil sampel laki-laki karena laki-laki lebih banyak bergerak serta turut aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti gotong royong dan musyawarah desa.

### 5.1.2 Umur Responden

Untuk mengetahui tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.2**  
**Tingkat Umur Responden**

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	17 - 25 Tahun	10	11,50
2.	26 - 34 Tahun	31	35,63
3.	35 - 43 Tahun	29	33,33
4.	44 Tahun keatas	17	19,54
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden terbanyak adalah pada tingkat umur 26-34 tahun yaitu sebanyak 31 responden atau 35,63%. Tingkat umur 17-25 sebanyak 10 responden atau 11,50%, kemudian tingkat umur 35-43 sebanyak 29 responden atau 33,33%, dan tingkat umur 44 tahun keatas berjumlah 17 responden atau 19,54%.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden sudah cukup dewasa dalam memberikan tanggapan-tanggapannya terhadap pertanyaan dalam kuisisioner penelitian ini, sebab menurut penulis kedewasaan umur dapat memberikan isyarat terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikir yang lebih matang dan lebih bijak, karena umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman yang mereka peroleh.

### 5.1.3 Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan sangat diperlukan dalam pembangunan, karena dengan pendidikanlah sumber daya manusianya akan berkualitas. Untuk mengetahui

gambaran dan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.3**  
**Tingkat Pendidikan Responden**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tamat SD	13	14,94
2	Tamat SLTP / Sederajat	39	44,83
3	Tamat SLTA / Sederajat	29	33,33
4	Sarjana (S1)	6	06,90
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang terpilih dalam penelitian ini adalah 87 responden dengan berbagai tingkatan pendidikan yaitu, yang mempunyai latar belakang tamat SD sebanyak 13 orang responden atau 14,94%, tamatan SLTP sebanyak 39 responden atau 44,83%, tamatan SLTA 29 responden atau 33,33%, dan yang mempunyai latar belakang lulusan Perguruan Tinggi atau sarjana sebanyak 6 responden atau 06,90%.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa secara umum tingkat pendidikan responden sudah dapat dikatakan baik karena mayoritas responden paling tidak sudah mengenyam pendidikan di SD yaitu responden yang termasuk dalam kategori umur 44 tahun keatas. Namun demikian, variasi tingkat pendidikan responden sudah cukup baik karena mencakup seluruh tingkat pendidikan yakni mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA dan ada juga yang Perguruan Tinggi.

#### 5.1.4 Mata Pencaharian Responden

Berikut ini adalah data mata pencaharian responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel V.4**  
**Jenis Mata Pencaharian Responden**

No	Mata Pencaharian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Nelayan	17	19,54
2	Petani	14	16,09
3	Karyawan Swasta	24	27,59
4	Pedagang	15	17,24
5	PNS	10	11,49
6	Penambang pasir	7	08,05
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian responden adalah sebagai karyawan swasta yaitu 24 orang atau 27,59%, nelayan sebanyak 17 orang atau 19,54%, pedagang sebanyak 15 orang atau 17,24%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 orang atau 11,49%, dan responden yang bekerja sebagai penambang pasir sebanyak 7 orang atau 08,05%.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa sebagian besar mata pencaharian responden adalah sebagai pekerja swasta yaitu 24 orang, yang bekerja di perusahaan swasta yaitu PT. Wira Penta Kencana dan PT. Bukit Granit Mining Mandiri, yang mana perusahaan ini beroperasi di Desa Pongkar. Kemudian untuk 15 orang responden yang mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang, 17 responden bekerja sebagai nelayan yang rata-rata bertempat tinggal di pesisir pantai, 14 responden bekerja sebagai petani yang menanam sayur seperti cabe rawit, jagung, timun dsb. Selanjutnya untuk 10

orang responden yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah para guru Sekolah Dasar dan SLTP yang berada di Desa Pongkar dan untuk 7 orang responden yang bekerja sebagai penambang pasir atau buruh harian lepas adalah masyarakat yang menambang pasir di sekitaran danau dan tanah kosong.

## **5.2 Peranan Kepala Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun**

Pembangunan desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang dipimpin oleh kepala desa sebagai pucuk pimpinan tertinggi di desa dan sebagai penentu utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa. Oleh karena itu, kepala desa harus mampu melakukan rentetan usaha dengan partisipasi aktif masyarakat dalam iklim demokratis untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan tata kehidupan serta sarana kehidupan, demi pencapaian kesejahteraan, kebaikan serta keadilan merata.

Demi tercapainya tujuan pembangunan desa, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus mampu melaksanakan tugas dan menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa. Sebagai administrator pembangunan di desa kepala desa memiliki peranan penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang dicita-citakan bersama. Untuk menjalankan peranannya sebagai administrator pembangunan, maka sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa yang berkedudukan sebagai pemimpin pemerintah desa yang mempunyai tugas :



- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa;
- b. Menyenggarakan urusan pembangunan yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan yaitu dengan pengelolaan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi;
- d. Menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Adapun hasil penelitian penulis mengenai Peranan Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun adalah penulis uraikan dibawah ini.

#### **5.2.1 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa**

Adapun yang dimaksud dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, seperti menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan desa, mengambil keputusan dengan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menggerakan penyelenggaraan pelayanan di desa, menggerakan lembaga kemasyarakatan di desa, pengaturan desa melalui peraturan yang dibuat kepala desa bersama BPD, melaksanakan peraturan dan mengawasi kegiatan/program dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang kemampuan kepala desa dalam menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

**Tabel V.5**  
**Jawaban Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Menyusun Perencanaan Sesuai dengan Kebutuhan Desa**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	10	11,49
3	Cukup Baik	63	72,41
4	Kurang Baik	14	16,09
5	Tidak Baik	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai kemampuan kepala desa dalam menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan tidak ada yang menyatakan sangat baik, kemudian yang menyatakan baik 10 orang atau 11,49%, yang menyatakan cukup baik 63 orang atau 72,41%, kurang baik sebanyak 14 orang atau 16,09% dan tidak ada responden yang menyatakan tidak baik.

Perencanaan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan desa yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Kepala desa memiliki peranan dalam menyusun perencanaan tersebut. Oleh karenanya perencanaan yang dibuat harus benar-benar matang serta harus menentukan langkah-langkah yang ditempuh. Pada kenyataanya kepala desa cukup memiliki kemampuan tersebut hanya saja pada tahap pelaksanaan terkadang perencanaan tersebut sulit direalisasikan karena kurangnya pertimbangan kepala desa dalam menetapkan langkah-langkah yang harus diambil,

akibatnya terkadang perencanaan terhambat dalam pelaksanaan serta bisa sampai tidak tercapai. Hal ini disesuaikan dengan wawancara penulis dengan ketua BPD, Bapak Said Musafar :

*“Dalam membuat perencanaan kepala desa selalu bermusyawarah dengan masyarakat khususnya dalam forum resmi seperti musyawarah desa, hanya saja kepala desa kurang menentukan langkah apa yang konkret agar perencanaan tersebut terealisasi. Misalnya dalam rencana pembuatan pasar desa sejak lama sampai sekarang belum jelas langkah-langkah yang diambil kepala desa” (wawancara, 17 Desember 2012, pukul 08.50 wib)*

Perencanaan erat kaitannya dengan kemampuan dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan kepala desa harus mampu menganalisa kebutuhan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan masyarakat secara umum. Adapun jawaban responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengambil keputusan dengan melibatkan pertimbangan masyarakat adalah sebagai berikut :

**Tabel V.6**  
**Jawaban Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengambil Keputusan dengan Melibatkan Masyarakat**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	4,60
2	Baik	19	21,84
3	Cukup Baik	39	44,83
4	Kurang Baik	25	28,74
5	Tidak Baik	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengambil keputusan dengan melibatkan pertimbangan masyarakat secara umum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang menyatakan sangat baik 4 orang atau 4,60 %, kemudian yang

menyatakan baik sebanyak 19 orang atau 21,84%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 39 orang atau 44,83%, kurang baik sebanyak 25 orang atau 28,74% dan tidak ada responden yang menyatakan tidak baik atau 0%.

Pengambilan keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan masyarakat di pemerintahan desa memang mutlak perlu dilakukan. Hal ini menyangkut kehidupan demokrasi yang dijalankan kepala desa. Berdasarkan data diatas kemampuan kepala desa dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan masyarakat dapat dikatakan cukup baik karena rata-rata jawaban yang banyak berada di katagori cukup baik. Dalam mengambil keputusan tidak selamanya keputusan yang diambil memuaskan seluruh pihak karena banyaknya kepentingan. Sebagai penjelasan penulis kutip wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Bapak Iskandar :

*“Dalam mengambil keputusan kepala desa memang sering meminta pendapat masyarakat, khususnya hal-hal yang menyangkut kepentingan langsung terhadap masyarakat, dalam musyawarah misalnya, namun terkadang keputusan yang diambil kurang mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat” (wawancara, 15 Desember 2012, pukul 17.00 wib)*

Kemudian, berikut hasil penelitian penulis mengenai kemampuan kepala desa menggerakkan bawahan dalam kegiatan pelayanan di kantor desa :

**Tabel V.7**  
**Jawaban Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Menggerakkan Bawahan Dalam Kegiatan Pelayanan di Kantor Desa**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	2,30
2	Baik	21	24,14
3	Cukup Baik	27	31,03
4	Kurang Baik	34	39,08
5	Tidak Baik	3	3,45
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai kemampuan kepala desa dalam menggerakkan bawahan dalam kegiatan pelayanan di kantor desa, yang menjawab sangat baik 2 orang atau 2,30%, baik sebanyak 21 orang atau 24,14% , cukup baik sebanyak 27 orang atau 31,03%, kurang baik sebanyak 34 orang atau 39,08%, dan tidak baik 3 orang atau 3,45%. Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa kepala desa kurang baik dalam menggerakkan bawahan dalam kegiatan pelayanan di kantor desa.

Pemimpin adalah pelayan, oleh karenanya peranan kepemimpinan adalah melakukan pelayanan. Kepala desa sebagai pucuk pimpinan di pemerintahan desa berperan melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai organisasi pemerintahan tentunya desa memiliki aparat yang membantu kepala desa dalam melakukan pelayanan. Penggerakan penyelenggaraan pelayanan mutlak perlu dilakukan kepala desa sebagai administrator pembangunan. Penggerakan menurut Sondang (2012:95) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan cara, tehnik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif, efesien dan ekonomis.

Kepala desa kurang maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada jam kantor. Kepala desa sangat sedikit meluangkan waktunya untuk duduk dikantor akibatnya aparat desa yang lain sebagai bawahan juga kurang maksimal dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Komunikasi yang kurang maksimal terhadap bawahan juga

menjadi faktor kendala. Sehingga keberadaan kepala desa terkadang kurang diketahui oleh aparat desa lainnya. Bahkan sehabis tengah hari sebagian aparat desa sudah tidak ada dikantor. Sehingga cukup menghambat warga yang membutuhkan pelayanan yang seharusnya sampai habis jam kantor. Hal ini di sesuaikan dengan wawancara penulis dengan ketua BPD, Bapak Said Musafar :

*“Pelayanan terhadap masyarakat di kantor desa sebenarnya belum dikatakan maksimal, kepala desa sering tidak ada ditempat sehingga kurang bisa mengontrol kegiatan pelayanan, sementara kalau mau bertemu harus via telpon terlebih dahulu, selain itu kebanyakan pegawai di desa sudah banyak yang pulang dan sering tidak kembali setelah jam makan siang” (wawancara, 17 Desember 2012, pukul 09.00 wib)*

Dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan juga memainkan peranan penting sebagai wadah atau potensi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya dalam pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah menumbuhkembangkan partisipasi, kegotongroyongan dan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa. sedangkan tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;

- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapat dilokasi penelitian, jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Pongkar yaitu :

- a. Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW) ;
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- d. Karang Taruna.

Adapun jawaban responden mengenai kemampuan kepala desa dalam menggerakkan lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai berikut :

**Tabel V.8**  
**Jawaban Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa dalam Menggerakkan Lembaga Kemasyarakatan Desa**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	31	35,63
3	Cukup Baik	34	39,08
4	Kurang Baik	10	11,49
5	Tidak Baik	12	13,79
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai kemampuan kepala desa dalam menggerakkan lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra kerja, mengatakan sangat baik tidak ada atau 0%, kemudian yang menyatakan baik sebanyak 31 orang atau 35,63%, dan yang menyatakan cukup baik sebanyak 34 orang atau 39,08%, kurang baik sebanyak 10 orang atau 11,49% dan yang menyatakan tidak baik sebanyak 12 orang atau 13,79%.

Penggerakan yang dilakukan kepala desa terhadap Lembaga kemasyarakatan desa berdasarkan jawaban responden rata-rata dapat dikatakan cukup baik. Karang taruna, PKK dan LPMD sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan hanya menjadi formalitas organisasi yang ada di desa saja. Namun khusus untuk PKK memang kegiatan yang dijalankan sudah cukup baik, karena ada kegiatan pengajian yang dijalankan setiap minggunya. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan tokoh masyarakat, Bapak Tamsir :

*“Lembaga kemasyarakatan di desa pongkar kurang memainkan peranannya dengan baik, karang taruna misalnya sejak terbentuk tidak jelas struktur organisasinya, kegiatanpun dapat dikatakan tidak ada atau tidak banyak yang tampak, kepengurusan yang tidak jelas dan sudah tidak aktif, pemuda lebih banyak bergerak berdasarkan organisasi pemuda yang ada di setiap RW dan itupun hanya beberapa yang aktif, berbeda halnya dengan PKK yang memiliki kegiatan tiap minggunya misalnya pengajian ibu-ibu. LPMD hanya menjadi formalitas organisasi desa saja, sementara belum jelas gebrakan yang dibuat, pada dasarnya kegiatan Lembaga Kemasyrakatan itu sendiri tidak lepas dari upaya kepala desa untuk menggerakannya yang menurut saya belum maksimal”(wawancara, 16 Desember 2012, pukul 09.30 wib)*

Sesuai dengan Perda Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2010, pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya perlu ada hubungan kerjasama agar terjadi keseimbangan bagi dua lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Agar hasil kebijakan dan pelaksanaanya



benar-benar berdasarkan kepentingan masyarakat. Adapun tanggapan responden mengenai pengaturan desa melalui peraturan yang dibuat kepala desa bersama BPD sebagai berikut :

**Tabel V.9**  
**Jawaban Responden Mengenai Peraturan Desa yang dibuat Kepala Desa Bersama BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	11	12,64
3	Cukup Baik	25	28,74
4	Kurang Baik	35	40,23
5	Tidak Baik	16	18,39
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012*

Berdasarkan tabel di atas mengenai pengaturan desa melalui peraturan yang dibuat kepala desa bersama BPD, tidak ada responden yang menjawab sangat baik, sebanyak 11 orang atau sebesar 12,64% responden menjawab baik, sebanyak 25 orang atau sebesar 28,74 % responden menjawab cukup baik, kemudian sebanyak 35 orang atau sebesar 40,23 % responden menjawab kurang baik dan sebanyak 16 orang atau sebesar 18,39 % responden menjawab tidak baik. Dari penjelasan tabel diatas dapat dilihat pengaturan desa melalui peraturan yang dibuat kepala desa bersama BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kurang baik yaitu 35 orang atau sebesar 40,23 % responden menjawab kurang baik.

Kepala desa bersama BPD dapat membuat peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Kenyataan yang terjadi dilapangan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut. Kepala desa bersama BPD membuat peraturan seperti Peraturan Desa

mengenai APBDes. Masyarakat yang menjawab baik hanya sekedar tahu perencanaan kepala desa tentunya sudah termuat dalam peraturan desa.

Senada dengan yang disampaikan oleh ketua BPD Bapak Said Musafar :

*“Pemerintah Desa dan BPD sudah membuat dan mengesahkan Peraturan Desa, namun tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang paham dan tidak mengetahui tentang keberadaan berbagai Peraturan serta keputusan kepala desa yang telah disahkan”*(wawancara, 17 Desember 2012, pukul 09.20 wib).

Beberapa kegiatan juga pernah dilakukan oleh pemerintah desa, seperti pembentukan Usaha Ekonomi Desa yang pernah dilakukan, hanya saja dari legalitas usaha itu tidak diperhatikan, karena tidak ada peraturan yang dibuat. Selain itu peraturan desa yang dibuat tentunya harus disosialisasikan dan dijalankan oleh kepala desa, oleh karenanya berikut tanggapan responden mengenai pelaksanaan peraturan desa/kebijakan oleh kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Tabel V.10**  
**Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Peraturan Desa/Kebijakan Oleh Kepala Desa**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	11	12,64
3	Cukup Baik	40	45,98
4	Kurang Baik	30	34,48
5	Tidak Baik	6	6,90
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012*

Berdasarkan tabel di atas mengenai pelaksanaan peraturan desa/kebijakan oleh kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak ada responden yang menjawab sangat baik, sebanyak 11 orang atau sebesar 12,64% responden menjawab baik, sebanyak 40 orang atau sebesar

45,98 % responden menjawab cukup baik, kemudian sebanyak 30 orang atau sebesar 34,48 % responden menjawab kurang baik dan sebanyak 6 orang atau sebesar 6,90 % responden menjawab tidak baik. Peraturan desa yang dibuat tentu harus dijalankan. Berdasarkan jawaban responden kepala desa cukup baik dalam menjalankan peraturan desa/kebijakan. Namun masih terdapat responden yang menjawab kurang baik.

Selanjutnya untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan kepala desa dalam setiap kegiatan/program, berikut tanggapan responden :

**Tabel V.11**  
**Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Kepala Desa**  
**Dalam Setiap Program/Kegiatan**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	12	13,79
3	Cukup Baik	30	34,48
4	Kurang Baik	41	47,13
5	Tidak Baik	4	4,60
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan pengawasan kepala desa dalam setiap program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjawab sangat baik tidak ada atau 0%, baik sebanyak 12 orang atau 13,79% , cukup baik sebanyak 30 orang atau 34,48%, kurang baik sebanyak 41 orang atau 47,13%, dan tidak baik 4 orang atau 4,60%. Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa kepala desa kurang baik dalam mengawasi pelaksanaan program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa kurang mengawasi pelaksanaan program/kegiatan, akibatnya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dilapangan. Misalnya di kantor desa sendiri sebagai tempat oprasional kegiatan pelayanan di desa. Aparat desa sering tidak disiplin baik dalam berpakaian maupun bekerja. Dalam pelaksanaan program pembangunan juga sering terjadi kecurangan yang dilakukan kontraktor, seperti pengurangan bahan material, atau pembangunan tidak sesuai dengan target yang diharapkan, jikapun tahu tidak ada ketegasan kepala desa untuk memperbaiki. Hal ini senada dengan yang disampaikan tokoh masyarakat Bapak Tamsir :

*“Pengawasan yang dilakukan kepala desa masih belum maksimal, aparat desa yang tidak disiplin akibat kepala desa yang juga kurang disiplin bagaimana mau mengawasi? kepala desa hanya ada dikantor pagi hari, pelaksanaan dilapangan juga demikian banyak penyimpangan yang terjadi misalnya pembangunan turap di RW 3 yang belum diselesaikan kontraktor, padahal bayarannya sudah lunas, kepala desa tidak memberikan sangsi yang tegas mungkin karena pihak kontraktor merupakan masyarakat desa Pongkar sendiri” (wawancara, 16 Desember 2012, pukul 09.45 wib)*

Berdasarkan jawaban responden dari masing-masing sub indikator peranan kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan maka disusun rekapitulasinya yaitu sebagai berikut :

**Tabel V.12**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Peranan Kepala Desa Dalam**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat Baik		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		Tidak Baik			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Menyusun Perencanaan	-	0	10	11,49	63	72,41	14	16,09	-	0	87	100
Mengambil Keputusan	4	4,60	19	21,84	39	44,83	25	28,74	-	0	87	100
Menggerakkan bawahan	2	2,30	21	24,14	27	31,03	34	39,08	3	3,45	87	100
Menggerakan Lembaga Kemasyarakatan	-	0	31	35,63	34	39,08	10	11,49	12	13,79	87	100
Peraturan yang dibuat kepala desa dan BPD	-	0	11	12,64	25	28,74	35	40,23	16	18,39	87	100
Pelaksanaan peraturan desa	-	0	11	12,64	40	45,98	30	34,48	6	6,90	87	100
Pengawasan kepala desa dalam setiap kegiatan	-	0	12	13,79	30	34,48	41	47,13	4	4,60	87	100
Jumlah	6	0,99	115	18,88	258	42,36	189	31,03	41	6,73	609	100

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012.

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat diketahui peranan kepala desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang menyatakan sangat baik sebanyak 6 orang atau sebesar 0,99 %, sebanyak 115 orang atau 18,88 % responden menyatakan baik, kemudian yang menyatakan cukup baik sebanyak 258 orang atau 42,36%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 189 orang atau 31,03%, serta yang menyatakan tidak baik sebanyak 41 orang atau 6,73 %. Dari rekapitulasi di atas dapat disimpulkan peranan kepala desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dinyatakan cukup baik atau 55,27% berdasarkan hasil pengolahan data jawaban responden.

### 5.2.2 Menyelenggarakan Urusan Pembangunan

Banyak referensi mengatakan suksesnya pembangunan sebuah desa tergantung dari partisipasi masyarakatnya. Karena dengan berpartisipasi, masyarakat akan merasa memiliki. Penyelenggaraan urusan pembangunan di Desa Pongkar oleh kepala desa diukur dari bagaimana kepala desa memberdayakan masyarakat di dalam proses pembangunan. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

**Tabel V.13**  
**Jawaban Responden Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kepala Desa dengan Memfasilitasi Masyarakat Dalam Perencanaan**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	2,30
2	Baik	17	19,54
3	Cukup Baik	40	45,98
4	Kurang Baik	23	26,44
5	Tidak Baik	5	5,75
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012*

Berdasarkan tabel diatas mengenai jawaban responden tentang pemberdayaan masyarakat oleh kepala desa dengan memfasilitasi masyarakat dalam menentukan pembangunan fisik yang akan dibuat, 2 orang atau 2,30% responden menjawab sangat baik, 17 orang atau 19,54% responden menjawab baik, kemudian sebanyak 40 orang atau sebesar 45,98 % responden menjawab cukup baik, dan sebanyak 23 orang atau sebesar 26,44 % responden menjawab kurang baik, serta sebanyak 5 orang atau sebesar 5,75 % responden menjawab tidak baik. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitasi kepala desa terhadap masyarakat untuk ikut menentukan pembangunan yang akan dibuat cukup baik yaitu sebanyak 40 orang atau sebesar 45,98 %.

Adapun fasilitasi yang diberikan kepala desa terhadap masyarakat adalah dengan mengajak masyarakat untuk bermusyawarah menentukan pembangunan, seperti dalam forum musbangdes dan musrembang yang diadakan. Adapun perwakilan masyarakat yang datang terdiri atas Lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat. Namun memang tidak semua aspirasi masyarakat dapat tertampung, sehingga harus ditentukan skala prioritas dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan kepala desa, Bapak Zulkarnain :

*“Dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa mengajak masyarakat untuk bermusyawarah melalui forum seperti musbangdes dan musrembang. Masyarakat yang diundang terdiri atas lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat, namun tidak semua aspirasi yang terkumpul dilaksanakan, maka ia disaring lagi untuk memilah mana yang paling penting” (wawancara, 18 Desember 2012, pukul 08.40 wib)*

Untuk mengetahui bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel V.14**  
**Jawaban Responden Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	3	3,45
2	Baik	20	22,99
3	Cukup Baik	30	34,48
4	Kurang Baik	31	35,63
5	Tidak Baik	3	3,45
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden mengenai pemberdayaan masyarakat oleh kepala desa dengan memfasilitasi dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat sebanyak 3 orang atau sebesar 3.45%

responden menjawab sangat baik, sebanyak 20 orang atau sebesar 22,99% responden menjawab baik, kemudian sebanyak 30 orang atau sebesar 34,48% responden menjawab cukup baik, dan sebanyak 31 orang atau sebesar 35,63% responden menjawab kurang baik, serta sebanyak 3 orang atau sebesar 3,45 % responden menjawab tidak baik. Berdasarkan uraian tabel diatas dapat disimpulkan upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di desa kurang baik hal ini terlihat dengan banyaknya responden yang menjawab kurang baik sebanyak 31 orang atau sebesar 35,63%.

Pemberdayaan dapat diartikan upaya memandirikan masyarakat desa (Azam, 2010:48). Pemberdayaan yang dimaksud yakni memandirikan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan melalui swadaya, baik itu harta maupun tenaga. Pada kenyataannya swadaya masyarakat seperti ini sangat kurang. Masyarakat pada umumnya lebih banyak menerima hasil pembangunan tanpa ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Ini dikarenakan kesibukan dan ketidakpedulian masyarakat. Pelaksanaan pembangunan hanya dilakukan oleh sekompok masyarakat tertentu yang dibayar dengan sistem proyek. Berikut petikan wawancara yang dilakukan dengan kepala desa Bapak Zulkarnain :

*“Pelaksanaan pembangunan di desa telah diupayakan dengan memberdayakan masyarakat, dalam prakteknya memang pengerjaan pembangunan hanya dilakukan oleh kelompok tertentu yang dibayar untuk mengerjakan proyek pembangunan, swadaya masyarakat dari tenaga dan biaya sangat kurang, karena masyarakat sibuk dengan kepentingan masing-masing serta menganggap pemerintah desa lebih memiliki andil untuk itu” (wawancara, 18 Desember 2012, pukul 08.50 wib)*



Pengawasan merupakan hal penting agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan juga perlu dilakukan masyarakat, adapun tanggapan responden mengenai pemberdayaan masyarakat oleh kepala desa dengan memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa adalah sebagai berikut :

**Tabel V.15**  
**Jawaban Responden Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kepala Desa Untuk Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	12	13,79
3	Cukup Baik	33	37,93
4	Kurang Baik	37	42,53
5	Tidak Baik	5	5,75
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012*

Berdasarkan tabel mengenai jawaban responden pemberdayaan masyarakat oleh kepala desa dengan memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan, tidak ada responden yang menjawab sangat baik atau 0%, sebanyak 12 orang atau sebesar 13,79% responden menjawab baik, sebanyak 33 orang atau sebesar 37,93% responden menjawab cukup baik, sebanyak 37 orang atau sebesar 42,53% responden menjawab kurang baik dan sebanyak 5 orang atau sebesar 5,75% responden menjawab tidak baik. Dari tabel diatas diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat oleh kepala desa dengan memfasilitasi untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan kurang baik karena sebanyak 37 orang atau sebesar 42,53 % responden menjawab kurang baik.

Kepala desa melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat di desa. Kepala desa siap menampung pengaduan masyarakat karena adanya kotak saran di kantor desa. Akan tetapi kepala desa terkadang kurang respon dalam menanggapi laporan dari masyarakat apabila terjadi penyimpangan di lapangan serta kepala desa kurang tegas menindak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan wawancara penulis dengan tokoh masyarakat, Bapak Tamsir :

*“Kiranya kepala desa kurang respon dan kurang tegas dalam menyikapi laporan yang disampaikan masyarakat, kotak saran hanya menjadi hiasan menurut saya, setidaknya kepala desa harus mengambil langkah dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan, sementara kalau masyarakat merasa tidak punya kewenangan untuk itu”* (wawancara, 16 Desember 2012, pukul 09.50 wib)

Pembangunan sarana dan prasarana tentunya harus mempunyai tujuan yang jelas, pembangunan yang dilakukan harus pembangunan yang benar-benar mendatangkan kemamfaatan bagi seluruh masyarakat secara umum. Berikut tanggapan responden mengenai keaktifan atau pemamfaatan pembangunan oleh masyarakat :

**Tabel V.16**  
**Jawaban Responden Mengenai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Umum di Desa**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	10	11,49
2	Baik	37	42,53
3	Cukup Baik	29	33,33
4	Kurang Baik	9	10,34
5	Tidak Baik	2	2,30
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari tabel jawaban responden mengenai pemamfaatan sarana dan prasarana desa bagi masyarakat dapat dilihat yaitu sebesar 10 orang atau sebesar 11,49 % responden menjawab sangat baik, sebanyak 37 orang atau sebesar 42,53% responden menjawab baik, sebanyak 29 orang atau sebesar 33,33 % responden menjawab cukup baik, kemudian sebanyak 9 orang atau sebesar 10,34 % responden menjawab kurang baik, dan 2 orang atau 2,30% responden yang menjawab tidak baik. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan sebanyak 37 orang atau sebesar 42,53% responden menjawab pemanfaatan sarana dan prasarana umum di desa sudah baik. Sebagian besar responden menyatakan baik, dikarenakan hasil pemabangunan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

**Tabel V.17**  
**Jawaban Responden Mengenai Upaya Kepala Desa Memberdayakan Masyarakat Untuk Memelihara Sarana dan Prasarana Umum**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	13	14,94
3	Cukup Baik	40	45,98
4	Kurang Baik	19	21,84
5	Tidak Baik	15	17,24
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel di atas mengenai jawaban responden tentang upaya kepala desa dengan memberdayakan masyarakat untuk memelihara sarana dan prasana umum di desa yaitu tidak ada yang menjawab sangat baik atau 0%, sebanyak 13 orang atau sebesar 14,94% reponden menyatakan baik, sebanyak 40 orang atau 45,98% responden menjawab cukup baik, sebanyak 19 orang atau 21,84 % responden menjawab kurang baik dan 15 orang atau 17,24%

responden menjawab tidak baik. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa upaya kepala desa dengan memberdayakan masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana umum di desa cukup baik yaitu dengan persentase 52,87 % atau sebanyak 46 orang responden menjawab cukup baik.

Pemeliharaan hasil pembangunan bisanya dilakukan masyarakat dengan gotong royong. Pada kenyataannya memang kesadaran masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan masih belum optimal. Ini tidak lepas dari upaya kepala desa dengan mengajak masyarakat melakukan gotong royong melalui perangkat RT setempat untuk memelihara hasil pembangunan yang ada tempat masing-masing. Berikut petikan wawancara dengan kepala desa, Bapak Zulkarnain :

*“Dalam upaya pemeliharaan sarana dan prasarana umum saya serahkan kepada Ketua RT untuk memberdayakan masyarakat memelihara melalui gotong royong, jadi kebijakan pemeliharaan tergantung perangkat RT setempat, selain itu saya selalu menyampaikan agar seluruh masyarakat dapat menjaga dan memelihara bangunan-bangunan desa” (wawancara, 18 Desember 2012, pukul 09.00 wib)*

Secara keseluruhan untuk mengetahui peranan kepala desa dalam penyelenggaraan urusan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

**Tabel V.18**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Peranan Kepala Desa**  
**Dalam Menyelenggaraan Urusan Pembangunan**

Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat Baik		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		Tidak Baik			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Memfasilitasi dalam perencanaan	2	2,30	17	19,54	40	45,98	23	26,44	5	5,75	87	100
Memfasilitasi dalam pelaksanaan	3	3,45	20	22,99	30	34,48	31	35,63	3	3,45	87	100
Memfasilitasi dalam pengawasn	-	0	12	13,79	33	37,39	37	42,53	5	5,75	87	100
Pemanfaatan sarana dan prasarana	10	11,49	37	42,53	29	33,33	9	10,34	2	2,30	87	100
Memelihara sarana dan prasarana	-	0	13	14,94	40	45,98	19	21,84	15	17,24	87	100
Jumlah	15	3,45	99	22,76	172	39,54	119	27,36	30	6,90	435	100

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012.

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat diketahui peranan kepala desa dalam penyelenggaraan urusan pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang menyatakan sangat baik sebanyak 15 orang atau sebesar 3,45 %, sebanyak 99 orang atau 22,76% responden menyatakan baik, kemudian yang menyatakan cukup baik sebanyak 172 orang atau 39,54%%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 119 orang atau 27,36%, serta yang menyatakan tidak baik sebanyak 30 orang atau 4,35 %. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan peranan kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan cukup baik atau dengan persentase 55,70% berdasarkan pengolahan jawaban responden.

### 5.2.3 Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan, harus partisipatif, transparans dan akuntabel serta dijalankan dengan tertib administrasi. Jadi dapat dinyatakan dalam mengelola keuangan desa kepala desa harus melibatkan masyarakat dalam menentukan penggunaan keuangan desa, kemudahan akses masyarakat untuk mengetahui, memberikan keterangan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa, dan harus tertib dalam pencatatan keuangan desa.

**Tabel V.19**  
**Jawaban Responden Mengenai Kesempatan Masyarakat Untuk Ikut Menentukan Penggunaan Keuangan Desa**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	23	26,44
3	Cukup Baik	40	45,98
4	Kurang Baik	13	14,94
5	Tidak Baik	11	12,64
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Berdasarkan jawaban responden mengenai kesempatan masyarakat untuk ikut menentukan penggunaan keuangan desa, tidak ada responden yang menjawab sangat baik, sebanyak 23 orang atau sebesar 26,44 % responden menjawab baik, sebanyak 40 orang atau sebesar 45,98% responden menjawab

cukup baik, kemudian sebanyak 13 orang atau sebesar 14,94% responden menjawab kurang baik, dan sebanyak 11 orang atau sebesar 12,64 % responden menjawab tidak baik. Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan penggunaan keuangan desa cukup baik yaitu dengan persentase sebesar 45, 98% atau sebanyak 40 orang yang memilih kategori jawaban cukup baik.

Dalam pengelolaan keuangan masyarakat telah dilibatkan, setiap tahun masyarakat akan diajak bermusyawarah menentukan pembangunan yang juga bersumber dari keuangan desa. Masyarakat yang diundang hanya perwakilan lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Memang tidak semua aspirasi masyarakat bisa tertampung dan bisa terwakili oleh sebagian masyarakat yang diundang namun tetap saja prosedur dalam penyusunan APBDes yang berawal dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa telah dilaksanakan. Hal ini senada dengan yang disampaikan sekertaris desa, Bapak Muhammad Jahid :

*“Sebelum penyusunan APBDes yang ditetapkan pemerintah desa bersama BPD, kami telah mengundang seluruh masyarakat melalui perwakilan seperti Rt, Rw, Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, beserta tokoh-tokoh pemuda dan masyarakat untuk bermusyawarah menentukan pembangunan yang sebagian juga bersumber dari keuangan desa” (wawancara, 18 Desember 2012, pukul 11.00)*

Salah satu asas dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi atau biasa dikenal keterbukaan, hal ini ditandai dengan kemudahan akses informasi untuk mengetahui sesuatu hal, baik itu dengan bertanya langsung maupun melalui pemberitaan yang sebarakan melalui media seperti papan pengumuman, selebaran, penyampaian melalui surat, dsb. Berikut tanggapan

masyarakat mengenai akses masyarakat untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa :

**Tabel V.20**  
**Jawaban Responden Mengenai Akses Masyarakat untuk Mengetahui Informasi Pengelolaan Keuangan Desa**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	11	12,64
3	Cukup Baik	32	36,78
4	Kurang Baik	28	32,18
5	Tidak Baik	16	18,39
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel diatas tidak ada responden menjawab sangat baik atau 0%, 11 orang atau 12,64% responden menjawab baik, kemudian 32 orang atau 36,78% responden menjawab cukup baik, dan 28 orang atau 32,18% responden menjawab kurang baik, serta 16 orang atau 18,39% responden menjawab tidak baik. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui pengelolaan keuangan desa kurang transparan, dengan banyaknya responden yang menjawab kurang baik dan tidak baik yaitu 50,57%.

Hal ini disebabkan masyarakat kesulitan untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah desa. Ketidakjelasan ini juga dipicu minimnya informasi yang tertera di papan pengumuman yang ada di kantor desa. Selain itu masyarakat masih merasa enggan untuk bertanya langsung, apalagi jika dengan kepala desa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Iskandar :

*“Transparansi pengelolaan keuangan saya pikir masih belum dilaksanakan dengan baik, secara umum masyarakat tentunya ingin mengetahui bagaimana kondisi keuangan desa yang sesungguhnya, selain harus disampaikan secara lisan seharusnya juga*



*ada informasi melalui papan pengumuman. informasi yang ada di papan pengumuman dapat mengatasi masyarakat masih enggan untuk bertanya” (wawancara 15 Desember 2012, pukul 17.40 wib)*

Dalam pengelolaan keuangan desa juga harus dipertanggungjawabkan khususnya oleh kepala desa. Oleh karenanya berikut tanggapan responden mengenai pertanggung jawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa :

**Tabel V.21**  
**Jawaban Responden Mengenai Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	6	6,90
3	Cukup Baik	51	58,62
4	Kurang Baik	27	31,03
5	Tidak Baik	3	3,45
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai keterangan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa yaitu tidak ada responden yang menjawab sangat baik, kemudian sebanyak 6 orang atau sebesar 6,90 % responden menjawab baik, sebanyak 51 orang atau sebesar 58,62% responden menjawab cukup baik, sebanyak 27 orang atau sebesar 31,03% responden menjawab kurang baik, dan sebanyak 3 orang atau sebesar 3,45% responden menjawab tidak baik. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keterangan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa cukup baik yaitu sebanyak 51 orang atau sebesar 58,62% responden yang memilih kategori jawaban cukup baik.

Kewajiban kepala desa adalah menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati, keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta pokok-pokok pertanggung jawaban ke masyarakat. sebagian besar masyarakat menjawab cukup baik. Karena terkadang kepala desa juga menyampaikan penggunaan keuangan desa pada forum-forum seperti musyawarah kecil, berikut hasil wawancara dengan kepala desa, Bapak Zulkarnain :

*“Keterangan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa terkadang saya sampaikan langsung kepada masyarakat, melalui forum atau musyawarah kecil. Tanggapan masyarakat tidak ada yang berlebihan dan mereka menerima dengan baik apa yang saya sampaikan” (wawancara, 18 Desember 2012, pukul 09.00 wib)*

Dalam kaitan pertanggung jawaban maka kepala desa perlu menjalankan tertib administrasi berikut tanggapan responden mengenai pelaksanaan pencatatan dan pembukuan keuangan desa :

**Tabel V.22**  
**Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Pencatatan dan Pembukuan Keuangan Desa**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	4,60
2	Baik	13	14,94
3	Cukup Baik	53	60,92
4	Kurang Baik	17	19,54
5	Tidak Baik	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Berdasarkan tabel diatas, jawaban responden pelaksanaan pencatatan dan pembukuan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu yang menyatakan sangat baik sebanyak 4 orang atau 4,60% , responden menyatakan baik sebanyak 13 orang atau 14,94%, responden menjawab cukup baik 53 orang atau 60,92%, responden menjawab kurang baik 17 orang atau 19,54%. Dari tabel tersebut

dapat disimpulkan pelaksanaan pencatatan dan pembukuan keuangan desa cukup baik.

Adapun rekapitulasi peranan kepala desa dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

**Tabel V.23**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa**

Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat Baik		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		Tidak Baik			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Kesempatan masyarakat menentukn Penggunaan keuangan desa	-	0	23	26,44	40	45,98	13	14,94	11	12,64	87	100
Akses masyarakat untuk mengetahui pengelolaa n keuangan	-	0	11	12,64	32	36,78	28	32,18	16	18,39	87	100
Pertanggung gjawaban kades dalam keuangan	-	0	6	6,90	51	58,62	27	31,03	3	3,45	87	100
Pencatatan dan pembukuan keuangan	4	4,60	13	14,94	53	60,92	17	19,54	-	0	87	100
Jumlah	4	1,15	53	15,23	176	50,57	85	24,43	30	8,62	348	100

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat diketahui peranan kepala desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa di desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 4 orang atau 1,15% menyatakan sangat baik, sebanyak 53 orang atau 15,23% responden menyatakan baik, kemudian yang menyatakan cukup baik sebanyak 176 orang atau 50,57 %, dan yang

menyatakan kurang baik sebanyak 85 orang atau 24,43%, serta yang menyatakan tidak baik sebanyak 30 orang atau 8,62%. Secara keseluruhan peranan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas partisipatif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa dinyatakan cukup baik atau berada pada persentase 55,17% berdasarkan pengolahan tanggapan responden.

#### **5.2.4 Menyelenggarakan Urusan Kesejahteraan Masyarakat**

Menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat merupakan peranan yang harus dimainkan Kepala Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Adapun upaya yang harus dilakukan kepala desa adalah melakukan pembinaan kehidupan masyarakat, seperti hadir dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, pembinaan keagamaan, penyuluhan, pembinaan terhadap generasi muda, selain itu kepala desa juga melakukan upaya pembinaan perekonomian desa, upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, upaya dalam melestarikan budaya dan adat istiadat.

Berikut penulis uraikan hasil penelitian mengenai peranan kepala desa dalam menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat, pertama pembinaan melalui penyuluhan, seperti penyuluhan kesehatan sebagai berikut :

**Tabel V.24**  
**Jawaban Responden Mengenai Pembinaan Masyarakat Melalui Kegiatan**  
**Penyuluhan, Seperti Penyuluhan Kesehatan**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	28	32,18
3	Cukup Baik	34	39,08
4	Kurang Baik	23	26,44
5	Tidak Baik	2	2,30
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat tidak ada yang menjawab sangat baik atau 0%, 28 orang atau sebesar 32,18% responden menjawab baik, kemudian sebanyak 34 orang atau sebesar 39,08% responden menjawab cukup baik, sebanyak 23 orang atau sebesar 26,44% responden menjawab kurang baik, dan sebanyak 2 orang atau 2,30% responden menjawab tidak baik. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan upaya kepala desa dalam pembinaan kehidupan masyarakat desa pongkar melalui kegiatan penyuluhan cukup baik yaitu sebanyak 34 orang atau sebesar 39,08% % responden menjawab cukup baik.

Adapun upaya pembinaan yang dilakukan kepala desa melalui kegiatan penyuluhan dan program-program pemerintah seperti KB, penyuluhan terhadap Ibu Hamil, demam berdarah juga dilakukan dengan kerjasama pihak terkait. Hanya saja minat masyarakat untuk mengetahui dan menghadiri acara seperti ini sangat rendah. Berikut hasil wawancara penulis dengan kepala desa, Bapak Zulkarnain :

*“Kegiatan penyuluhan seperti ini cukup sering dilakukan apalagi jika terdapat kejadian-kejadian luar biasa, memang yang menjadi kendala minat masyarakat untuk mengetahui sangat minim” (Wawancara, 18 Desember 2012, pukul 09.10 wib)*

Selain kegiatan penyuluhan, sebagai kepala desa kehadirannya dalam kegiatan masyarakat tentunya sangat diharapkan, berikut tanggapan responden :

**Tabel V.25**  
**Jawaban Responden Mengenai Upaya Pembinaan Dengan Ikut Berpartisipasi Dalam Kegiatan Masyarakat Seperti Gotong Royong**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	9	10,34
3	Cukup Baik	26	29,89
4	Kurang Baik	41	47,13
5	Tidak Baik	11	12,64
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Berdasarkan tabel diatas jawaban sangat baik tidak ada dinyatakan responden atau 0%, sebanyak 9 orang atau sebesar 10,34 % responden menjawab baik, kemudian 26 orang atau sebesar 29,89% responden menjawab cukup baik, dan sebanyak 41 orang atau sebesar 47,13 % responden menjawab kurang baik serta sebanyak 11 orang atau sebesar 12,64 % responden menjawab tidak baik. Dari penjelasan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pembinaan masyarakat oleh kepala desa dengan menghadiri/turut serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, kurang baik hal ini terlihat dari 41 orang atau sebesar 47,13 % responden menjawab kategori jawaban kurang baik.

Senada dengan jawaban responden hal demikian juga dinyatakan tokoh masyarakat Bapak Tamsir :

*“Setahu saya selama ini kalau masyarakat dusun teluk lekup mengadakan gotong royong kepala desa jarang ada atau bahkan tidak pernah hadir, padahal kehadiran kepala desa bisa memberi motivasi*

*tersendiri kepada masyarakat” (wawancara, 16 Desember 2012, pukul 10.00 wib)*

Untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang bertaqwa, kepala desa perlu mengintensifkan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian dan ceramah, berikut tanggapan responden :

**Tabel V.26**  
**Jawaban Responden Mengenai Upaya Pembinaan Masyarakat Oleh Kepala Desa Melalui Kegiatan keagamaan**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	30	34,48
3	Cukup Baik	43	49,43
4	Kurang Baik	10	11,49
5	Tidak Baik	4	4,60
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari data pada tabel, jawaban responden mengenai upaya kepala desa dalam pembinaan kehidupan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, tidak ada yang menjawab sangat baik atau 0% responden, 30 orang atau 34,48 % responden menjawab baik, kemudian sebanyak 43 orang atau 49,43 % responden menjawab cukup baik dan 10 orang atau 11,49 % responden menjawab kurang baik, serta 4 orang atau sebesar 4,60 % responden menjawab tidak baik. Berdasarkan penjelasan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat melalui kegiatan keagamaan cukup baik yaitu sebanyak 43 orang atau sebesar 49,43 % responden yang menyatakan.

Bentuk-bentuk kegiatan keagamaan di Desa Pongkar adalah seperti pengajian rutin Ibu-ibu PKK, dan berbagai kegiatan pengajian yang dilakukan di setiap masjid. Pembinaan keagamaan lebih ditekankan kepada agama Islam

sebagai agama mayoritas masyarakat Desa Pongkar. Setiap hari besar Islam akan diadakan acara-acara peringatan seperti ceramah agama yang biasanya penceramah didatangkan dari luar desa. Namun kegiatan-kegiatan seperti ini masih kurang menarik perhatian masyarakat. rata-rata hampir setiap masjid, jemaah yang datang sedikit, apalagi kalau hari-hari biasa kemudian pendidikan Islam bagi anak-anak sudah digiatkan dengan adanya TPQ, MDA yang oprasionalnya ada di setiap RW di Desa Pongkar sebagai bentuk pembinaan keagamaan sejak dini. Hal ini senada dengan yang di sampaikan Kepala Desa Pongkar Bapak Zulkarnain :

*“Pembinaan masyarakat melalui kegiatan keagamaan bagi masyarakat sudah dijalankan, seperti dengan adanya TPQ, MDA selain itu kegiatan-kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan juga mendatangkan penceramah dari luar desa, namun memang partisipasi masyarakat dalam hal-hal keagamaan memang masih minim, dari setiap kegiatan ceramah baik itu pada hari besar sekalipun masih minim minat masyarakat untuk menghadiri (wawancara, 18 Desember 2012, pukul 09.30 wib)*

Kesejahteraan masyarakat di desa juga harus diukur dari perekonomian desa yang bersangkutan. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai peranan kepala desa dalam membina ekonomi desa yaitu sebagai berikut :

**Tabel V.27**  
**Jawaban Responden Mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Membina Perekonomian Desa**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	11	12,64
3	Cukup Baik	31	35,63
4	Kurang Baik	22	25,29
5	Tidak Baik	23	26,44
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*



Berdasarkan tabel diatas jawaban responden mengenai peranan kepala desa dalam membina perekonomian desa tidak ada responden yang menjawab sangat baik atau 0%, sebanyak 11 orang atau sebesar 12,64% responden menjawab baik, kemudian sebanyak 31 orang atau 35,63% responden menjawab cukup baik, dan sebanyak 22 orang atau sebesar 25,29 % responden menjawab kurang baik, serta terdapat 23 orang atau sebesar 26,44 % responden menjawab tidak baik. Jadi dapat terlihat upaya kepala desa dalam membina perekonomian desa dapat dinyatakan kurang baik yaitu ditunjukkan dengan persentase rata-rata responden menunjukan jawaban antara kurang dan tidak baik.

Desa Pongkar berada pada posisi yang menguntungkan karena berada pada wilayah pertambangan geranet, sehingga kebanyakan masyarakat bekerja di perusahaan tersebut. Adapun dari pemerintahan desa upaya untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat yang telah dilakukan adalah dengan mengembangkan Usaha Ekonomi Desa berupa jasa penyaluran pasir pada tahun 2011 yang hanya berjalan dalam hitungan bulan, namun pada kenyataannya usaha ini sudah tidak berjalan lagi sekarang. Berbagai kegiatan ini merupakan bentuk upaya kepala desa yang dapat dikatakan gagal, selain itu pemamfaatan tanah kas desa untuk berkebun yang digarap oleh masyarakat, usaha ini juga menemui kegagalan. Pasar desa yang direncanakan oleh kepala desapun semenjak ia diangkat belum terealisasi karena faktor lahan, partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah yang masih minim.

Pembahasan ini berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua BPD, Bapak Said Musafar pada :

*“Berbagai upaya memang sudah dilakukan kepala desa, seperti perencanaan pembuatan pasar desa dalam rangka pembinaan perekonomian desa namun belum terlaksana karena belum mendapatkan lokasi serta dukungan penuh masyarakat, selain itu pengembangan UED jasa penyaluran pasir, dan pemanfaatan tanah kas desa untuk perkebunan, namun upaya ini telah menemui kegagalan” (wawancara, 17 Desember 2012, pukul 10.00 wib)*

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, himpitan ekonomi menjadi sebuah masalah yang harus diatasi. Dalam prakteknya proses pemenuhan kebutuhan sangat dibutuhkan kesabaran dan kerja keras serta tidak melupakan untuk selalu saling menjaga dan menghargai antar sesama manusia. Di Desa Pongkar tidak jarang terjadi perselisihan antar warga di desa, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, dan faktor yang sering memicu perselisihan adalah masalah ekonomi, seperti sengketa tanah antar sesama warga di Desa Pongkar. Oleh karenanya kedudukan sebagai kepala desa harus mampu mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Berikut rekapitulasi jawaban responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mendamaikan perselisihan yang terjadi :

**Tabel V.28**  
**Jawaban Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Mendamaikan Perselisihan Masyarakat Desa**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	6	6,89
2	Baik	31	35,63
3	Cukup Baik	45	51,72
4	Kurang Baik	5	5,75
5	Tidak Baik	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas jawaban responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mendamaikan perselisihan yang terjadi, 6 orang atau 6,89% responden menjawab sangat baik, sebanyak 31 orang atau sebesar 35,63% responden menjawab baik, kemudian sebanyak 45 orang atau sebesar 51,72% responden menjawab cukup baik, dan sebanyak 5 orang atau sebesar 5,75% responden menjawab kurang baik serta tidak ada yang menjawab tidak baik atau 0% responden. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 45 orang atau sebesar 51,72 % kemampuan kepala desa dalam mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat cukup baik.

Dalam mendamaikan perselisihan yang terjadi kepala desa melakukan musyawarah dengan mempertemukan kedua pihak yang berselisih kemudian mendamaikan. Perselisihan yang sering terjadi adalah masalah batas tanah atau sengketa lahan. Kedua pihak yang berselisih terkadang dapat didamaikan namun pada kasus tertentu belum bisa terselasaikan karena kepala desa sendiri tidak mau membawa persolan ke ranah hukum, karena memikirkan masyarakat Desa Pongkar kebanyakan masih mempunyai ikatan darah yang sama, hal ini senada dengan yang disampaikan tokoh masyarakat Bapak Iskandar :

*“Perselisihan yang terjadi di desa sering dipicu masalah sengketa lahan dan perkelahian pemuda, dalam penyelesaiannya kepala desa selalu mengedepankan musyawarah dengan mempertemukan pihak yang bertikai” (wawancara, 15 Desember 2012, pukul 17.45 wib)*

Untuk mencegah hal-hal yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlu upaya agar dapat tercipta, berikut tanggapan responden

mengenai upaya kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat :

**Tabel V.29**  
**Jawaban Responden Mengenai Upaya Kepala Desa Dalam**  
**Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	13	14,94
3	Cukup Baik	39	44,83
4	Kurang Baik	28	32,18
5	Tidak Baik	7	8,05
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Berdasarkan tabel diatas jawaban responden mengenai upaya kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa , tidak ada atau 0% responden menjawab sangat baik, sebanyak 13 orang atau sebesar 14,94% responden menjawab baik, kemudian sebanyak 39 orang atau sebesar 44,83% responden menjawab cukup baik, dan sebanyak 28 orang atau sebesar 32,18% responden menjawab kurang baik serta 7 orang atau 8,05% menjawab Tidak Baik. Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa upaya kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat cukup baik yaitu sebanyak 39 orang yang menyatakan.

Dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, di setiap RW telah dibangun pos penjagaan masyarakat, atau poskamling. Dengan demikian masyarakat dapat mengadakan ronda untuk menjaga keamanan. Namun kegiatan-kegiatan penjagaan seperti ini sudah jarang dilaksanakan, di beberapa poskamling di Desa Pongkar yang seharusnya digunakan untuk berjaga, yang terjadi pos ini dijadikan tempat tongkrongan pemuda untuk

mabuk-mabukan. Hal ini senada yang disampaikan tokoh masyarakat Bapak

Tamsir :

*“Kebiasaan pemuda disini biasanya mabuk-mabukan yang juga tidak enak dipandang mata karena ini kebiasaan buruk, seharusnya pos ronda dijadikan tempat berjaga bukan ajang untuk berkumpul bagi para pemuda, hal seperti ini perlu ketegasan dan sikap kepala desa, untuk mengatur dan menertibkan misalnya dengan menetapkan kader untuk keamanan” (wawancara, 16 Desember 2012, pukul 10.40 wib)*

Selain itu agar kegiatan-kegiatan negatif berkurang maka perlu kegiatan pelestarian budaya dan adat yang memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku. Upaya pelestarian adat dan budaya juga hal terpenting agar tidak hilang ditelan zaman serta desa bisa dibangun dengan suasana kearifan lokal. Berikut tanggapan terhadap upaya pelestarian budaya dan adat istiadat :

**Tabel V.30**  
**Jawaban Responden Mengenai Upaya Kepala Desa Dalam Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	-	0
2	Baik	15	17,24
3	Cukup Baik	36	41,38
4	Kurang Baik	16	18,39
5	Tidak Baik	20	22,99
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Berdasarkan tabel diatas jawaban responden mengenai upaya kepala desa dalam pelestarian budaya dan adat istiadat tidak ada responden yang menjawab sangat baik, sebanyak 15 orang atau sebesar 17,24% responden menjawab baik, kemudian sebanyak 36 orang atau sebesar 41,38% responden menjawab cukup baik, dan sebanyak 16 orang atau sebesar 18,39 % responden menjawab kurang baik serta sebanyak 20 orang atau sebesar 22,99 % responden menjawab upaya kepala desa dalam pelestarian budaya dan adat

istiadat tidak baik. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 36 orang atau sebesar 41,38% upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam pelestarian budaya dan adat cukup baik.

Pelestarian budaya dan istiadat memang sangat penting dilakukan, kebudayaan dan pesta adat hanya ada pada waktu tertentu seperti acara pernikahan. Kepala desa selalu mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat, adapun bentuk pelestarian yang dilakukan adalah dengan melatih pemuda untuk bermain kompang, silat, dan takjilan. Namun ini masih sangat minim karena hanya dilakukan oleh kelompok keluarga yang tidak terkoordinir dengan baik, di satu sisi minat generasi muda untuk belajar kebudayaan dan adat melayu masih sangat minim. Hal ini senada dengan yang disampaikan tokoh masyarakat Bapak Iskandar :

*“Pelestarian budaya dan adat sangat urgen untuk dilakukan, mengingat minat generasi muda yang sangat minim sekali, ditambah lagi dengan latihan-latihan yang dilakukan kelompok di masyarakat belum terkoordinir dengan baik” (wawancara, 15 Desember 2012, pukul 17.20 wib)*

Berdasarkan penjabaran sub indikator yang diajukan kepada responden diatas maka berikut rekapitulasi jawaban responden peranan dalam penyelenggaraan urusan kesejahteraan masyarakat :

**Tabel V.31**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Peranan Kepala Desa Dalam**  
**Penyelenggaraan Urusan Kesejahteraan Masyarakat**

Sub  Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat Baik		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		Tidak Baik			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Pembinaan melalui penyuluhan	-	0	28	32,18	34	39,08	23	26,44	2	2,30	87	100
Menghadiri acara	-	0	9	10,34	26	29,89	41	47,13	11	12,64	87	100
Pembinaan keagamaan	-	0	30	34,48	43	49,43	10	11,49	4	4,60	87	100
Pembinaan perekonomian	-	0	11	12,64	31	35,63	22	25,29	23	26,44	87	100
Mendamaikan perselisihan	6	6,89	31	35,63	45	51,72	5	5,75	-	0	87	100
Menjaga ketertiban	-	0	13	14,94	39	44,83	28	32,18	7	8,05	87	100
Melestarikan budaya dan adat	-	0	15	17,24	36	41,38	16	18,39	20	22,99	87	100
Jumlah	6	0,98	137	22,50	254	41,71	145	23,81	67	11,00	609	100

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat diketahui peranan kepala desa dalam penyelenggaraan urusan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang menyatakan sangat baik sebanyak 6 orang atau 0,98%, 137 orang atau 22,50% responden menyatakan baik, kemudian yang menyatakan cukup baik sebanyak 254 orang atau 41,71%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 145 orang atau 23,81%, serta yang menyatakan tidak baik sebanyak 67 orang atau 11,00%. Secara keseluruhan kepala desa melaksanakan peranannya dalam menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat dengan cukup baik yakni berada pada persentase 55,73%.

### 5.3 Analisa Data

Dari indikator-indikator variabel pada penelitian ini, maka selanjutnya dapat disimpulkan rekapitulasi hasil penelitian dari seluruh indikator yaitu sebagai berikut :

**Tabel V.32**  
**Rekapitulasi Keseluruhan Hasil Penelitian tentang Peranan Kepala Desa**  
**Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Pongkar**

Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat Baik		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		Tidak Baik			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Menyelenggarakan urusan pemerintahan	6	0,99	115	18,88	258	42,36	189	31,03	41	6,73	609	100
Menyelenggarakan urusan pembangunan	15	3,45	99	22,76	172	39,54	119	27,36	30	6,90	435	100
Menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa	4	1,15	53	15,23	176	50,57	85	24,43	30	8,62	348	100
Menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat	6	0,98	137	22,50	254	41,71	145	23,81	67	11,00	609	100
Jumlah	31	1,55	404	20,19	860	42,98	538	26,89	168	8,40	2001	100

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012.

Keterangan :

F = Frekuensi

% = Persentase



Dari tabel diatas diketahui hasil dari rekapitulasi seluruh indikator dalam penelitian ini. Untuk mengukur peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun maka berikut penulis paparkan hasilnya :

$$\text{Sangat Baik} : 5 \times 31 = 155$$

$$\text{Baik} : 4 \times 404 = 1616$$

$$\text{Cukup Baik} : 3 \times 860 = 2580$$

$$\text{Kurang Baik} : 2 \times 538 = 1076$$

$$\text{Tidak Baik} : 1 \times 168 = 168 \quad +$$

$$\text{Total Frekuensi} : 5595$$

$$N = 2001 \times 5 = 10005$$

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{5595}{10005} \times 100\%$$

$$P = 55,92 \%$$

Dari tabel rekapitulasi seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Peranan Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun masuk dalam kategori “**Cukup Baik**” hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar **55,92 %** atau berada pada jarak interval 41%-60%. Peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dapat dikatakan cukup baik karena kapela desa telah melaksanakan

peranannya walaupun masih banyak terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan tugas. Ini tidak lepas dari karena besarnya tugas dan tanggung jawab kepala desa yang harus diemban.

Berdasarkan hasil penelitian kepala desa mempunyai kemampuan memimpin secara demokrasi dengan cukup baik, ini terbukti dari setiap pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat secara umum kepala desa selalu meminta pendapat masyarakat khususnya kepada tokoh masyarakat, kemampuan komunikasi yang cukup baik juga mendukung aktifitas kepala desa ini. Satu hal yang menarik di Desa Pongkar koordinasi yang terjadi dimasing-masing lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kurang berjalan dengan baik, Ini menjadi kendalanya. Kepala desa kurang mengkoordinasikan kegiatan dan informasi baik kepada bawahan dan masyarakat secara umum. Seperti misalnya keberadaan kepala desa yang jarang berada dikantor sehingga mengakibatkan masyarakat kurang mendapatkan pelayanan sementara bawahan kepala desa terkadang kurang mengetahui sehingga ketika perlu, harus dihubungi via telepon terlebih dahulu. Selain itu kepala desa kurang mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa, dalam mengelola potensi yang ada harus dengan komitmen yang tinggi dan konsikwen serta legalitas yang jelas, namun kenyataannya saat ini di Desa Pongkar tidak ditemui usaha desa yang masih aktif, usaha yang telah dijalankan banyak menemui kegagalan, perlu ketegasan dan perhitungan yang lebih matang dalam menjalankan berbagai program serta selain itu legalitas usaha yang masih kurang diperhatikan karena tidak adanya peraturan desa

yang dibuat, pemahaman yang kurang bagi aparat pemerintahan di desa juga merupakan faktornya. Dalam pengawasan dan upaya untuk menjaga ketentraman kepala desa kurang tegas dalam menindak penyimpangan yang terjadi dan lebih cenderung membiarkan. Hal ini sebagian besar diakibatkan karena pertimbangan hubungan kekeluargaan.

Dengan hasil penelitian berdasarkan angket yang penulis sebarakan yang diolah menghasikan kesimpulan Kepala Desa Pongkar menjalankan peranan sebagai administrator pemabangunan dengan cukup baik. Usaha yang dilakukan kepala desa sudah cukup baik hanya saja perlu kemauan dan kerjasama yang lebih efektif untuk melakukan perbaikan bersama. Berdasarkan uraian dan data yang penulis dapatkan di lapangan ada beberapa hal yang menjadi hambatan-hambatan kepala desa dalam menjalankan peranannya sebagai administrator pembangunan di Desa Pongkar kecamatan Tebing kabupaten Karimun. Adapun faktor penghambat penulis bagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari diri kepala desa sendiri yaitu :

1. Masih lemahnya komunikasi dan koordinasi yang dijalankan kepala desa kepada bawahan, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang seharusnya dirangkul;
2. Kepala desa kurang mendayagunakan fungsi pengawasan sebagai alat pengendali untuk mencapai tujuan;

3. Kepala desa kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Jikapun kepala desa bersosialisasi hanya sebatas acara dan pada golongan tertentu di masyarakat.

Faktor eksternal yaitu faktor penghambat peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan yang berasal dari luar diri kepala desa yaitu :

1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa yang memadai yang rata-rata tamatan SMA dan masih ada Kaur yang hanya tamatan SMP dan SD;
2. Pemerintah daerah belum memfasilitasi pelaksanaan otonomi desa secara maksimal karena penganggaran ADD yang belum jelas dan belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Masyarakat menganggap pembangunan hanya tugas pemerintah;
4. Masyarakat sibuk dengan kegiatan sendiri dan telah menunjukkan masyarakat bercirikan perkotaan;
5. Masyarakat hanya mau berpartisipasi jika diuntungkan;
6. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap program-program pembinaan yang dilakukan;
7. Banyaknya masyarakat yang berpendidikan rendah mengakibatkan sulit untuk diajak maju dan berpikir kedepan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

**6.1.1** Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang diukur dari kemampuan kepala desa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2010, berikut penjelasan kesimpulan perindikator :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian, indikator ini mendapatkan skor dari responden dengan persentase 55, 27% dan masuk dalam katagori cukup baik.
2. Menyelenggarakan urusan pembangunan, berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian, indikator ini mendapatkan skor dari responden dengan persentase 55, 70% dan masuk dalam katagori cukup baik.
3. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian, indikator ini mendapatkan skor dari responden dengan persentase 55, 17% dan masuk dalam katagori cukup baik.
4. Menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian, indikator ini mendapatkan

skor dari responden dengan persentase 55, 73% dan masuk dalam katagori cukup baik.

Jadi secara keseluruhan peranan kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, menyelenggarakan urusan pembangunan, menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa, menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat maka dapat disimpulkan peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun setelah direkapitulasi dan ditabulasikan secara keseluruhan berada pada katagori **“Cukup Baik”** atau **55,92 %**. Peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan sudah berjalan dengan cukup baik karena di dasari oleh kepala desa cukup mampu memainkan peranannya, hanya saja kepala desa kurang merangkul dan memberdayakan lembaga kemasyarakatan di desa sebagai mitra kerja untuk melakukan perbaikan secara bersama-sama.

**6.1.2** Adapun faktor penghambat kepala desa dalam menjalankan peranannya sebagai administrator pembangunan, terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya kemampuan kepala desa dalam menkoordinasikan kegiatan dengan lembaga kemasyarakatan desa, kurang mendayagunakan fungsi pengawasan, Sedangkan faktor eksternal yang menghambat adalah minimnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan, kurangnya partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah belum memfasilitasi pelaksanaan otonomi desa secara maksimal karena penganggaran ADD yang belum jelas serta belum berjalan.

## 6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan demi tercapainya tujuan pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan hendaknya kepala desa lebih meningkatkan pengawasan sebagai alat pengendali serta lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga mitra kerja pemerintah desa.
2. Dalam menyelenggarakan urusan pembangunan kepala desa hendaknya lebih berupaya melaksanakan pembangunan dengan swadaya dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan.
3. Dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa hendaknya lebih transparan, seperti mempublikasikan keuangan desa yang terpakai untuk kegiatan-kegiatan tertentu di papan pengumuman kantor kepala desa.
4. Dalam menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat, kepala desa hendaknya dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, misalnya turut serta dalam kegiatan/acara seperti kegiatan gotong royong.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiffuddin, 2010, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta
- Awang, Azam, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- \_\_\_\_\_, 2006, *Otonomi Desa & Partisipasi Masyarakat*, Pekanbaru : Alaf Riau
- Depdiknas, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Jayaditana, Johara T. & I.G.P Pramandika, 2006, *Pembangunan desa dalam perencanaan*, Bandung: ITB
- Kartono, Kartini, 2006, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Norbuko, Cholid & Abu Achmadi, 2010, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga
- Pasolong, Harbani, 2011, *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta
- Riady & Deddy Supriyady B, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama
- Rivai, Veithzal, 2006, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Jakarta : Pt. RajaGrafindo Persada
- Siagian, Sondang P, 2009, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Silalahi, Ulbert, 2002, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Singarimbun, Masri dan Efendi Sofian, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada



- Sugiyono, 2010, *Metodelogi penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi, 2006, *Analisi Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Syafrudin, Ateng & Suprin Na'a, 2010, *Republik Desa*, Bandung : PT. Alumni
- Thoha, Miftah , 2006, *Kepemimpinan dalam manajemen*, Jakarta : Pt. RajaGrafindo Persada.
- Tjokroamidjodjo, Bintoro, 1995, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta ; LP3ES.
- Umar, Husein, 2002, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar, 2006, *Pengantar Statistik*, Jakarta: Bumi aksara
- \_\_\_\_\_, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi aksara
- Wasistiono, Sadu, M. Irwan Taher, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Jakarta : Fokus Media
- Widjaja, HAW, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2010

#### **JURNAL :**

- Muslim, Peranan Lembaga Sosial Dalam Pembangunan Desa Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus : Lembaga Musyawarah Besar Desa Buluhcina Kabupaten Kampar), *Jurnal El-Riyasah, Kepemimpinan dan Administrasi*, Vol. I, Juli 2011
- Khairil Henry, Proses Kepemimpinan Dalam Islam, *Jurnal El-Riyasah, Kepemimpinan dan Administrasi*, Vol. I, Juli 2011

## **WEBSITE :**

Ali Hanapiah Muhi, 2011, *Fenomena Pembangunan Desa*, Jawa Barat : IPDN,  
<http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/?p=752> diakses tanggal 6 Oktober 2012, Pukul 13.00  
wib

Syaifuddin Sabda, 2011, *Kepemimpinan Menurut Konsep Islam*, dalam  
[http://tarbiyah-iainantasari.ac.id/artikel\\_detail.cfm?judul=171](http://tarbiyah-iainantasari.ac.id/artikel_detail.cfm?judul=171) diakses tanggal  
24 Januari 2013, pukul 13.30 WIB

## **HASIL PENELITIAN :**

Desniati, 2009, *Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator, Inovator dan Pelopor Dalam Pembangunan di Desa Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Siak*, Pekanbaru: Skripsi, Program S1 UIN SUSKA

Dwi Ratna Ningsih, 2011, *Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator pembangunan di Desa Banjar Kecamatan Seminai Kabupaten Siak*, Pekanbaru : Skripsi, Program S1 UIN SUSKA

Sarinendy, 2009, *Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Keamatan. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*, Pekanbaru: Skripsi, Program S1 UIN SUSKA

Yayan Tri Wahyudi, 2012, *Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, Pekanbaru : Skripsi, Program S1 UIN SUSKA